



**PELAKSANAAN PEMBINAAN ANAK NAKAL
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK DALAM PERSPEKTIF
MODEL PEMBINAAN ANAK PERORANGAN
(*INDIVIDUAL TREATMENT MODEL*)
(Studi Pelaksanaan Pembinaan Anak di LPA Tangerang dan LPA Kutoarjo)**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

IRMA CAHYANINGTYAS, SH

B4A 006 039

PEMBIMBING :

Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH.MH

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2009



**PELAKSANAAN PEMBINAAN ANAK NAKAL
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK DALAM PERSPEKTIF
MODEL PEMBINAAN ANAK PERORANGAN
(*INDIVIDUAL TREATMENT MODEL*)
(Studi Pelaksanaan Pembinaan Anak di LPA Tangerang dan LPA Kutoarjo)**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

**IRMA CAHYANINGTYAS, SH
B4A 006 039**

PEMBIMBING :

Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH.MH

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2009**

**PELAKSANAAN PEMBINAAN ANAK NAKAL
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK DALAM PERSPEKTIF
MODEL PEMBINAAN ANAK PERORANGAN
(*INDIVIDUAL TREATMENT MODEL*)
(Studi Pelaksanaan Pembinaan Anak di LPA Tangerang dan LPA Kutoarjo)**

Disusun Oleh :

**Irma Cahyaningtyas, SH
B4A006039**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal

**Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum**

**Pembimbing
Magister Ilmu Hukum**

**Mengetahui
Ketua Program**

**Prof.Dr.Paulus Hadisuprpto, SH.MH
NIP. 130 531 702**

**Prof.Dr.Paulus Hadisuprpto, SH.MH
NIP. 130 531 702**

Ilmu itu lebih baik daripada harta.

Ilmu akan menjagamu, sedangkan harta harus engkau jaga.

Harta itu akan terkikis habis, dan menumpuk harta

akan lenyap bersamaan dengan habisnya kekayaan.

(Ali bin Abi Thalib)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat ALLAH SWT, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas penulisan tesis sebagai persyaratan akhir dalam menempuh Magister Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahNya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tugas berat ini tidak mungkin terselesaikan apabila tidak karena pertolongan ALLAH SWT dan bantuan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu serta karena dorongan moral dari orang tua, keluarga dan teman-teman.

Untuk itu, dengan iringan do'a nan tulus dan ikhlas semoga ALLAH SWT berkenan membalas amal sholehnya, maka tanpa bermaksud mengecilkan arti bantuan yang telah diberikan kepada penulis dari semua pihak, pada kesempatan ini secara khusus penulis menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof.Dr.Paulus Hadisuprpto, SH, MH, Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan selaku dosen pembimbing yang telah berkenan memberikan arahan, bimbingan,dan motivasi serta dorongan moral sehingga penulis akhirnya mampu menyelesaikan penulisan tesis ini.
2. Prof.Dr.Barda Nawawi Arief, SH, selaku dosen review proposal yang telah berkenan memberikan arahan dan bimbingan penulisan tesis,sehingga membantu keberhasilan penulis menyelesaikan tesis.

3. Ibu Nur Rochaeti,SH.M.Hum, selaku dosen review proposal yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis akhirnya mampu menyelesaikan penyusunan tesis ini.
4. Ibu Ani Purwanti,SH.M.Hum, selaku sekretaris bidang akademik yang telah memberikan motivasi dan dorongan bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis.
5. Seluruh dosen pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang telah berjasa kepada penulis selama menimba ilmu di program tersebut.
6. Seluruh tenaga administrasi pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menimba ilmu di program tersebut.
7. Bapak Paiman Saptohudoyo selaku Kepala Bimbingan Kesejahteraan dan Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan data-data yang diperlukan penulis dalam penulisan tesis.
8. Ibu Sondang Pakpahan selaku Kepala Bimbingan dan Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan data-data yang diperlukan penulis dalam penulisan tesis.
9. Teman-teman kuliah Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro angkatan 2006 yang telah memberikan bantuan dan masukan selama kegiatan perkuliahan.

10. Teman-teman kos, Vibrian Putri, S.Sos, Namira Fanessa, Faiza Malia, Mbak Temi, Laura Marentina, Hana Yustiana yang telah memberikan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan tesis.

Ucapan terimakasih teristimewa penulis tujukan kepada kedua orang tua penulis, Bapak Ir.Mochammad Abin MM dan Ibu Ratna Irawati L, SH serta kakak dan adik penulis, Drg. Taufik Ariwibowo dan Dimas Satrio Firdaus yang telah memberikan do'a, motivasi serta dorongan moral sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Ucapan terimakasih juga penulis tujukan kepada Mohammad Fajar Sunardi, SH yang berkat kesabarannya dan pengertiannya, serta memberikan dukungan kepada penulis agar dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

Akhirnya penulis menyadari segala kekurangan yang ada pada tesis ini karena semua ini disebabkan keterbatasan dan kekurang mampuan penulis, oleh karenanya segala kritik dan saran yang konstruktif, dengan hati yang tulus penulis tunggu dan harapkan demi sempurnanya penulisan tesis ini. Semoga karya kecil dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang peduli dan menaruh perhatian terhadap pengembangan ilmu di bidang hukum pidana khususnya hukum pidana anak.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, Maret 2009

Penulis

Irma Cahyaningtyas

ABSTRAK

Anak merupakan generasi penerus bangsa oleh karena itu, anak harus diberikan kasih sayang agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Seorang anak yang tidak mendapat kasih sayang, ia akan cenderung menjadi anak yang nakal dan akibatnya dapat melakukan perbuatan yang menyimpang yang melanggar undang-undang. Anak yang demikian harus menjalani proses pidana yang berujung pada suatu pembinaan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA). Salah satu bentuk pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) adalah pembinaan yang bersumber pada individu anak. Pembinaan itu disebut dengan pembinaan anak secara perorangan (*individual treatment model*).

Penelitian ini dilatarbelangi oleh suatu masalah yaitu pertama, bagaimana pelaksanaan *individual treatment model* dalam pembinaan anak nakal di Lembaga Pemasyarakatan (LPA); kedua, kendala apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan *individual treatment model* di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA); ketiga, bagaimana model alternatif yang lain dalam pembinaan anak nakal di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA).

Metode penelitian yang digunakan adalah 1) metode pendekatan yuridis empiris, 2) spesifikasi penelitian deskriptif analitis, 3) metode *purposive sampling*, 4) metode analisis data secara kuantitatif dan kuantitatif. Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang dan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo.

Analisis terhadap hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pertama, *individual treatment model* di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang dan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo telah dikenal. Adapun bentuk dari pembinaan individual itu adalah kegiatan pembinaan keagamaan dan konseling. Pada pelaksanaannya, metode tersebut tidak dapat diterapkan dengan baik di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang dan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo. Hal itu karena pembinaan anak yang seharusnya diberikan secara individual, pada kenyataannya diberikan kepada anak secara berkelompok sehingga tujuan dari pembinaan secara individu, yaitu semata-mata untuk kesejahteraan anak tidak tercapai; kedua, pelaksanaan *individual treatment model* juga tidak terlepas dari kendala yang ada, baik itu struktur, substansi, dan kultur; ketiga, kelemahan dari *individual treatment model* yaitu hanya menekankan pada kesejahteraan anak mendorong munculnya pembinaan restoratif. Pembinaan secara restoratif dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak yang ada disekitarnya, yaitu pelaku, keluarga, masyarakat, dan tidak tertutup kemungkinan korban sehingga membina anak dilakukan secara lebih manusiawi karena juga tetap diperhatikan kepentingan lainnya, yaitu masyarakat dan korban.

Kata kunci : Anak nakal, pembinaan anak, pembinaan anak secara perorangan.

ABSTRACT

Child was nation router generation therefore child should give affection so they could grow and develop properly. A child who didn't get affection they tend to be a juvenile and consequence may be able to carry out deviate action which collide with regulation. These child must execute criminal process that will ended to a behaviour treatment that will take place in The Juvenile Correction. One of the treatment that exist in The Juvenile Correction is a treatment that actually based to the child. Those kind of treatment called the individual treatment model.

This research background by issues, firstly how individual treatment model implementation in the treatment of juveniles in The Juvenile Correction; second, what kind of constraints which found in the individual treatment model in The Juvenile Correction; third, how was other alternative model in the treatment in The Juvenile Correction.

Research methods used were 1) juridical empirical approach method 2) specification of descriptive analytical research, 3) purposive sampling method 4) data analysis method both quantitative and qualitative. The research location was on The Juvenile Correction in Tangerang and Kutoarjo.

Analysis concerning this research explains that, first, individual treatment model in The Juvenile Correction of Tangerang and Kutoarjo was already known. There were the type of individual treatment were both religiousness and counseling treatment. For implementation, that method could not implement properly in both The Juvenile Correction of Tangerang and Kutoarjo. It was because child treatment which should be carry out individually in fact given in group therefore the aim of individually treatment, merely for child prosperity was not reach; second, individual treatment model implementation also have closely obstacle, that is structure, substantion, and culture; third, weakness of individual treatment model was emphasizes on child prosperity only which support arising restorative treatment. Restorative treatment carry out involving around parties, it was subject, family, society, and even victim therefore child treatment carry out more human because also keep pay attention other interest, it were both society and victim.

Keywords : Juvenile, juvenile treatment, individual treatment.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK TESIS.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR BAGAN	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Kerangka Pemikiran	11
F. Metode Penelitian	25
1. Metode Pendekatan	26
2. Spesifikasi Penelitian	27
3. Jenis Data.....	27
4. Metode Penentuan Sampel.....	29

5. Metode Analisis Data	29
G. Sistematika Penulisan	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	32
A. Pengertian Anak, Anak Nakal, dan Kenakalan Anak.....	32
B. Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak ...	36
C. Gambaran Tentang Sistem Pemasyarakatan	37
D. Model Pembinaan Anak Individual atau Perorangan	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	48
A. Pelaksanaan Individual Treatment Model Dalam Pembinaan Anak Nakal di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA)	48
1. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang.....	48
2. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo	53
3. Pelaksanaan Pembinaan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang	61
a. Pembinaan Secara Umum	61
b. Pembinaan Secara Individual atau Perorangan	65
4. Pelaksanaan Pembinaan Anak di Lembaga Pemasyarakatan (LPA) Anak Kutoarjo	69
a. Pembinaan Secara Umum	75
b. Pembinaan Secara Individual atau Perorangan	85

B. Kendala-Kendala yang Ditemui dalam Pelaksanaan <i>Individual Treatment Model</i> Terhadap Anak Nakal di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA).....	107
1. Kendala dalam Pelaksanaan Pembinaan Anak Nakal di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang	107
2. Kendala dalam Pelaksanaan Pembinaan Anak Nakal Secara Individual di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang	108
3. Kendala dalam Pelaksanaan Pembinaan Anak Nakal di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo	112
4. Kendala dalam Pelaksanaan Pembinaan Anak Nakal Secara Individual di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) di Kutoarjo	114
C. Bentuk Model Alternatif Lain Dalam Pembinaan Anak Nakal di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA)	115
BAB IV PENUTUP	126
A. Kesimpulan	126
B. Saran	129
DAFTAR PUSTAKA	130
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Anak Didik Berdasarkan Klasifikasi Kejahatan Anak di LPA Pria Tangerang	50
Tabel 2	Data Anak Didik Berdasarkan Klasifikasi Usia di LPA Pria Tangerang	51
Tabel 3	Data Anak Didik Berdasarkan Klasifikasi Kejahatan Anak di LPA Kutoarjo	56
Tabel 4	Data Anak Didik Berdasarkan Klasifikasi Jenis Kelamin di LPA Kutoarjo	58
Tabel 5	Data Anak Didik Berdasarkan Klasifikasi Usia di LPA Kutoarjo	59
Tabel 6	Tanggapan Anak Didik Terhadap Pelaksanaan Pembinaan	90
Tabel 7	Bentuk Pembinaan Secara Individual Terhadap Anak Didik	92
Tabel 8	Partisipasi Anak Didik Dalam Pembinaan Secara Individual	94
Tabel 9	Fasilitas Untuk Anak Didik Dalam Rangka Pembinaan Secara Individual	95
Tabel 10	Dukungan Keluarga Terhadap Anak Didik di LPA	97

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Skema Berpikir Penulisan Tesis	21
Bagan 2 Struktur Organisasi LPA Pria Tangerang.....	52
Bagan 3 Struktur Organisasi LPA Kutoarjo	60

DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
2. Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
3. United Nations Standards Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)
4. United Nations Standards Minimum Rules for Non Custodial Measures (The Tokyo Rules)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 menegaskan bahwa tujuan nasional negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Implementasi tujuan nasional dalam rangka mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, terwujud dengan adanya program pembangunan nasional.

Salah satu aspek pembangunan nasional yang erat kaitannya dengan pembangunan manusia seutuhnya adalah pembangunan di bidang hukum, terutama hukum pidana. Pembangunan hukum pidana di Indonesia diwujudkan melalui penegakan hukum pidana yang bekerja secara operasional melalui suatu sistem yang disebut Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).¹

Sebagai suatu sistem, peradilan pidana mempunyai perangkat struktur atau sub sistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan

¹ Diktat Akpol, *Sisdil di Indonesia*, (Semarang : Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, 2005), hal 46.

integral agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal. Subsistem-subsistem ini berupa Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga koreksi. Inilah yang dinamakan struktur hukum (*legal structure*).

Lembaga Pemasyarakatan (LP) mempunyai peran yang sangat besar dan strategis di dalam penegakan hukum pidana, yang semua itu dapat terwujud dalam pelaksanaan pembinaan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pelaksanaan pembinaan inilah yang dikenal dengan pemasyarakatan.

Pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata cara peradilan pidana, yang dikenal sebagai bagian integrasi dari tata peradilan terpadu (*Integrated Criminal Justice System*). Dengan demikian, pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan dan petugas pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakan hukum.

Dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat 2 menegaskan bahwa :

“ Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari keasalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab “.

Sistem pemasyarakatan di Indonesia sebenarnya adalah pengganti dari sistem kepenjaraan yang merupakan warisan kolonial. Istilah pemasyarakatan ini pertama kali dicetuskan oleh **Sahardjo** dalam pidato penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa dalam ilmu hukum oleh Universitas Indonesia di Istana Negara Jakarta pada tanggal 5 Juli 1963 dengan judul *Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pantjasila-Manipol/Usdek*, dimana selain mengemukakan konsepsi tentang hukum nasional, juga mengemukakan tentang tujuan pidana penjara yaitu disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, pidana bertujuan untuk membimbing terpidana agar bertobat, memberikan pendidikan supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis yang berguna. Dengan kata lain tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan.²

Diterapkannya sistem pemasyarakatan, Indonesia telah meninggalkan sistem kepenjaraan. Perubahan ini bukan hanya perubahan istilah saja, tetapi juga suatu perubahan yang mendasar. Dalam sistem kepenjaraan, yang ditekankan adalah unsur pembalasan dan penjaraan yang berujung pada penderitaan dan penyiksaan. Berbeda, dengan sistem pemasyarakatan yang lebih menekankan pada pengayoman dan pembinaan yang berwujud pemberian bimbingan dan pembinaan dibidang jasmaniah dan rohaniah sampai pada terwujudnya integrasi sehat dengan masyarakat.

Lahirnya sistem pemasyarakatan membawa Bangsa Indonesia memasuki era baru dalam pembinaan narapidana. Tujuan dari pembinaan

² R.Achmad S. Soemadi Praja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, (Bandung : Percetakan Ekonomi, 1992), hal 13.

narapidana adalah supaya setelah kembali ke masyarakat, narapidana tidak melakukan pelanggaran hukum lagi, serta dapat berperan aktif dan kreatif dalam pembangunan.

Dalam menjalani proses pemasyarakatan, narapidana perlu diperhatikan hak-haknya dan perlu diberi perlindungan hukum. Terlebih lagi, jika narapidana itu masih dibawah umur dalam arti ia belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, yang dalam pemasyarakatan disebut sebagai anak nakal.

Sebagai bagian dari generasi muda pembangun bangsa, penerus cita-cita perjuangan bangsa dan untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa, perlu dilakukan usaha berupa pembinaan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan hal yang akan membahayakan mereka di kemudian hari.

Konsideran Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada butir c dan d menyebutkan bahwa setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab melangsungkan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Oleh

karena itu, kepentingan anak harus dilindungi, tidak terkecuali ketika seorang anak berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA).

Masalah dan usaha perlindungan anak tampaknya tidak akan pernah berhenti dibicarakan sebagaimana dikemukakan oleh **Arif Gosita**.³

“Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, adalah membangun manusia seutuhnya. Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Mengabaikan masalah perlindungan anak tidak akan memantapkan Pembangunan Nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Maka ini berarti bahwa perlindungan anak harus diusahakan apabila ingin mengusahakan pembangunan nasional yang memuaskan”.

Ini berarti upaya perlindungan anak merupakan tugas bersama. Perlindungan anak merupakan tolak ukur peradaban masyarakat suatu bangsa, maka wajib diusahakan perlindungan anak demi kepentingan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum oleh karena itu perlu jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak tersebut. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat

³ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta : PT.Bhuana Ilmu Populer, 2004), hal 18.

negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.⁴

Dengan demikian perlindungan anak harus juga dilakukan terhadap anak yang mengalami masalah kelakuan (pelanggaran-pelanggaran usia muda), karena anak yang melakukan kejahatan bukan karena ia memiliki sifat jahat, tapi karena keadaan anak tersebut tidak stabil akibat keadaan yang datang dari anak itu sendiri maupun yang berasal dari dunia luar, yaitu lingkungan yang mengelilingi.⁵

Anak yang mengalami masalah kelakuan dikarenakan melakukan kejahatan dan pelanggaran dibina di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA). Keberadaan anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) memberikan peran, tugas dan tanggung jawab untuk melakukan upaya pembinaan anak nakal sebagai narapidana anak, hal tersebut seharusnya mempunyai dua unsur, yaitu :

1. Unsur perubahan sikap, mental, dan perilaku anak ke arah yang lebih baik.
2. Unsur perubahan perspektif negatif masyarakat terhadap ex-napi anak dalam lingkungan pergaulannya.

Pembinaan yang seharusnya dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan berorientasi kepada individu, dalam hal ini adalah narapidana anak dan sosial, dalam hal ini adalah masyarakat.

Perhatian terhadap pemikiran dan pengembangan tentang perlakuan dan pembinaan anak yang menjalani hukumannya di Lembaga

⁴ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta : Akademika Presindo, 1993), hal 222.

⁵ Loebby Loqman, (Makalah Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi UNDIP, 1995), hal 1-2

Pemasyarakatan tampaknya tidak pernah berhenti. Hal ini mungkin saja disebabkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat tentang besarnya peran dan tanggung jawab lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga pelaksanaan pembinaan narapidana anak di dalam lembaga. Akan tetapi pada kenyataannya pembinaan narapidana anak di lembaga pemasyarakatan masih disamakan dengan narapidana dewasa.

Sebagaimana dikatakan oleh **Mardjono Reksodiputro**⁶ :

“ Meskipun konsep pemasyarakatan terpidana kita sudah berumur lebih dari 30 tahun, namun belum jelas apakah dalam konsepsi pengembangan dan perluasan tersebut sudah ada pula pemikirannya yang membedakan secara konsepsional pembinaan orang dewasa dengan anak dan antara orang dewasa pria dengan orang dewasa wanita”.

Hal inilah yang perlu dicari pemecahannya karena, baik wanita maupun anak harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa (pria). tempat untuk mengadakan pembinaan anak yang baik adalah di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) yang memang dikondisikan untuk membina dan mendidik anak nakal agar dapat menjadi lebih baik.

Anak menjadi nakal atau kurang perhatian harus dicari sebabnya sehingga dapat lebih mudah untuk ditanggulangi. Penyebab anak melakukan kenakalan adalah karena keadaan ekonomi, pergaulan, dan memaksa anak-anak ini menjalani keadaan yang sebelumnya belum patut mereka jalani. Disamping itu, tidak efektifnya kinerja dari lembaga-lembaga yang terkait dalam Sistem Peradilan Pidana termasuk Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) dalam melakukan pembinaan narapidana anak. Hal itu dapat dilihat

⁶ Mardjono Reksodiputro, *Masa Depan Lembaga Pemasyarakatan Anak dan Lembaga Pemasyarakatan Wanita*, (Makalah pada Seminar Terpidana III, UI-Masumoto Foundation Japan, 1995), hal 1.

dari banyaknya anak yang melakukan kejahatan adalah anak-anak nakal yang sebelumnya pernah mendapat pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) dalam arti sudah pernah dijatuhi hukuman.

Dalam melaksanakan pembinaan, wujud yang ideal sebenarnya adalah individualisasi pembinaan. Hal tersebut adalah berdasarkan ide dari pemasyarakatan itu sendiri yaitu model pembinaan anak perorangan (*individual treatment model*). Khusus bagi anak, hal tersebut sangat dituntut. Dengan perkataan lain, pembinaan yang ditujukan kepada anak harus bersumber pada kategori-kategori, antara lain jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak, umur anak, pendidikan anak, pelakunya sudah pernah melakukan tindak pidana atau belum, dan lain-lain. Disamping itu juga harus diperhatikan kebutuhan anak lainnya, misalnya diadakannya kegiatan konseling, paket kerja dengan maksud agar anak mempunyai bekal hidup yang dapat dipergunakan setelah ia selesai menjalankan hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA).

Berpedoman pada gambaran diatas, lahirnya sistem pemasyarakatan sebagai suatu era baru dalam pembinaan narapidana memberikan hak bagi narapidana-narapidana termasuk bagi narapidana anak dalam bentuk perlakuan yang berbeda dengan narapidana dewasa. Selain itu, sangat diperlukan adanya pembinaan yang ditujukan untuk menjadikan anak yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) menjadi anak yang berkelakuan lebih baik.

Pembinaan itu dapat berupa pembinaan anak-anak secara bersama-sama atau pembinaan yang dilakukan secara individual. Pembinaan anak secara individual ini harus memperhatikan aspek anak sebagai objek yang harus dibina, diberikan perlakuan dan perhatian secara khusus. Oleh karena itu, sangat diperlukan berbagai peran dari pihak-pihak agar pembinaan anak tersebut dapat berhasil.

Pembinaan secara individual yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) berarti menjadikan Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) itu sebagai tumpuan terakhir bagi pemulihan sikap dan sifat dari anak nakal tersebut. Jadi, perlu diketahui bentuk dari pembinaan secara individual termasuk hal-hal yang sangat berkaitan dengan pembinaan terhadap anak nakal tersebut.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengajukan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan *individual treatment model* dalam pembinaan anak nakal di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) ?
2. Kendala apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan *individual treatment model* terhadap anak nakal di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) ?
3. Bagaimanakah bentuk model alternatif lain dalam pembinaan anak nakal di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan tersebut maka secara keseluruhan tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan *individual treatment model* dalam pembinaan anak nakal di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA).
2. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan *individual treatment model* terhadap anak nakal di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA).
3. Untuk mengkaji model alternatif pembinaan anak nakal di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) masa depan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan hukum, terutama di bidang ilmu hukum pidana.

2. Manfaat praktis

- a. Memberikan masukan mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.
- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum yang didasarkan pada fakta di lapangan dan disertai dengan teori-teori maupun peraturan-peraturan hukum positif.

- c. Sebagai stimulan serta sumbangan bagi masyarakat ilmiah pada umumnya untuk mencari, meneliti, menemukan dan memecahkan masalah-masalah hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, khususnya masalah anak nakal.

E. Kerangka Pemikiran

Anak merupakan generasi suatu bangsa. Generasi muda adalah harapan bangsa yang nantinya akan menggantikan generasi tua dalam menjalankan roda kehidupan negara.⁷ Oleh karena itu, anak harus diberikan kasih sayang dan dibina agar dapat tumbuh menjadi anak yang berkembang dengan baik. Pembinaan terhadap anak, harus dilakukan mulai dari lingkungan keluarga kemudian dilakukan pula pembinaan di luar lingkungan keluarga, misalnya sekolah, tempat kursus, dan sebagainya.⁸

Seorang anak yang tidak dibina dan tidak diperhatikan khususnya dalam lingkungannya, akan mengakibatkan timbulnya kenakalan-kenakalan terhadap anak yang dapat disebut juga dengan istilah kenakalan remaja. Kenakalan remaja itu akan mengganggu perkembangan baik dari segi fisik dan jiwa dari anak. Jadi terhadap anak yang melakukan kenakalan remaja itu harus mendapatkan perlakuan yang berbeda dari orang dewasa karena anak masih butuh perhatian lebih mengingat pertumbuhan fisik dan jiwanya.

⁷ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, (Jakarta : Djambatan, 2007), hal 2.

⁸ *Ibid*, hal 3.

Secara etimologis, *juvenile delinquency* berarti kejahatan anak. Istilah kejahatan anak ini dirasakan sangat tajam, dan memiliki konotasi negatif secara kejiwaan terhadap anak.⁹

Pada dasarnya, tingkah laku seseorang yang belum dewasa (anak) yang melanggar hukum/tindak pidana (misalnya : mencuri belum disebut sebagai kejahatan (kriminal) melainkan hanya disebut sebagai “kenakalan”.¹⁰

Kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan disadari oleh anak itu sendiri bahwa perbuatannya tersebut dapat dikenai sanksi atau hukuman (pidana).¹¹

Pemerintah telah melakukan suatu usaha untuk mengatur mengenai masalah anak, khususnya masalah anak nakal. Peraturan hukum yang terkait dengan anak nakal tersebar dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasysarakatan.

Menurut Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 butir 2, yang dimaksud dengan anak nakal adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau

⁹ Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya*, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 1997), hal 12.

¹⁰ Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja (Edisi Revisi)*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2003), hal 5.

¹¹ Paulus Hadisuprpto, *Op.cit*, hal 23.

b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Selain definisi anak nakal, Undang-Undang No.3 Tahun 1997 juga mengatur mengenai batasan umur anak, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4, yaitu¹² :

- (1) Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- (2) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke sidang anak.
Anak nakal yang melakukan perbuatan pidana merupakan anak-anak

yang harus ditangani dengan khusus. Penanganan yang dilakukan terhadap perkara anak yang lebih penting harus dilakukan sampai dengan cara pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Hal tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh **Bagir Manan** sebagaimana dikutip oleh **Gatot Supramono**.¹³

“ Di Lapangan hukum pidana anak-anak diperlakukan sebagai “orang dewasa kecil”, sehingga seluruh proses perkaranya kecuali di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan sama dengan perkara orang dewasa. Keadaan dan kepentingan anak sebagai anak-anak (orang belum dewasa) kadang-kadang sedemikian rupa diabaikan tanpa ada perlakuan-perlakuan yang khusus”.

Anak nakal harus mendapat pembinaan yang baik dengan tetap mengedepankan kepentingan-kepentingan anak. Tempat pembinaan terhadap

¹² Lihat Lampiran Pasal 4 dan penjelasannya dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

¹³ Gatot Supramono, *Op.cit*, hal 10.

anak nakal yang demikian dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) yang merupakan bagian dari pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan menurut **Baharudin Soerjobroto**, tidak luput pula dari pengaruh yang negatif dari hukum kelambatan manusia dan dikalangan masyarakat luas, "pemasyarakatan" ini diidentikkan dengan "kepenjaraan" bukan saja mengenai ruang lingkup kegiatannya, akan tetapi juga tentang dasar pengertiannya. Dalam rangka *prevention of crime* ada dua aspek yang sangat menonjol dari sistem pemasyarakatan dalam fungsinya yakni :

- a. Sebagai pembinaan dari pelaksanaan pidana (pidana penjara).
- b. Sebagai pembinaan dari yang dikenakan pidana (pidana penjara).¹⁴

Perkembangan sistem kepenjaraan yang dianut di Indonesia tidak dapat lepas dengan sistem kepenjaraan di dunia barat. Hal ini disebabkan sistem kepenjaraan kita merupakan peninggalan Pemerintah Hindia Belanda. "Pada zaman ini setiap orang harus melindungi dirinya dan harta miliknya dilanggar atau hak miliknya menurut caranya sendiri".¹⁵ Pidana merupakan suatu pembalasan dendam berupa pidana mati, siksaan badan, kerja paksa, pembuangan, denda dan lain-lain jenis pidana yang mengerikan. Belum dikenal bangunan penjara sehingga setiap orang yang berstatus tahanan disimpan di ruangan bawah tanah atau dibawah benteng. Begitu juga yang terjadi pada zaman VOC (1602-1800), zaman peralihan (1800-1808), zaman Pemerintahan Gubernur Deandels (1808-1816), zaman Pemerintahan

¹⁴ R.Achmad S.Soemadi Praja dan Romli Atmasasmita, *Op.cit*, hal 20.

¹⁵ A.Widiada Gunakaya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, (Bandung : Amrico, 1988), hal 28.

Inggris (1811-1942). Sejak saat itu penjara dengan Sistem Kepenjaraan diberlakukan dengan tujuan pencegahan pengulangan kejahatan dengan ajaran yang menganggap tujuan pidana sebagai pembalasan. Di tempat ini orang yang bersalah diperlakukan sedemikian rupa dengan mempergunakan sistem perlakuan tertentu (penyiksaan dan hukuman badan) dengan harapan supaya si bersalah menjadi jera sehingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan ia masuk penjara.

Dengan berjalannya waktu, sistem kepenjaraan yang dianut tersebut dirasakan tidak manusiawi. Oleh karena itu, dilakukan usaha-usaha untuk memperbaiki sistem kepenjaraan, sehingga sampailah pada usaha menggantikan sistem kepenjaraan, dengan “Sistem Pemasyarakatan”. Di dalam sistem ini narapidana hanya dibatasi kemerdekaannya saja sedangkan hak kemanusiaannya tetap dihargai. Di sini tugas hukum adalah memberikan pengayoman agar cita-cita luhur bangsa tercapai dan terpelihara.

Dalam kriminologi yang merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, dikenal salah satu aliran pemikiran yang cukup terkenal yaitu kriminologi positive. Kriminologi positive bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya, baik berupa faktor biologik maupun kultural. Manusia berubah dan berkembang bukan semata-mata karena intelegensianya, akan tetapi melalui proses yang berjalan secara pelan-pelan dari aspek biologiknya atau evolusi kultural. Adanya pandangan yang demikian, maka tugas kriminologi adalah menganalisis sebab-sebab perilaku kejahatan melalui studi ilmiah

terhadap ciri-ciri penjahat dari aspek fisik, sosial, dan kultural.¹⁶ Dengan adanya kejahatan yang dilakukan oleh orang, maka sangatlah penting untuk diketahui sebab-sebab atau latar belakang orang tersebut melakukan kejahatan, yang dalam kriminologi, dikenal dengan etiologi kriminal.

Etiologi kriminal adalah salah satu bagian utama dari kriminologi selain penologi dan sosiologi hukum pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh **Sutherland**. Adapun yang dimaksud dengan etiologi kriminal yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab kejahatan.¹⁷

Setiap orang yang mempunyai sifat jahat perlu diketahui sebab-sebab ia melakukan kejahatan. Dengan mengetahui sebab-sebabnya maka akan lebih mudah untuk memberi perlakuan atau pembinaan kepada orang yang berperilaku jahat tersebut. Jadi semua itu harus dititik beratkan terhadap pembinaan orang yang berperilaku jahat.

Pembinaan yang dilakukan kepada pelaku kejahatan akan mengarahkan kepada proses resosialisasi dan rehabilitasi si pelaku sebagai tujuan dari dilaksanakannya pembedaan. Hal tersebut perlu dilakukan karena pelaku dari kejahatan tidak dapat menyerap nilai-nilai sosial yang ada.

Sahardjo merumuskan tujuan dari pidana penjara adalah disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seseorang anggota masyarakat Indonesia yang berguna.¹⁸

¹⁶ I.S.Susanto, *Kriminologi*, (Semarang :Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1995), hal 5.

¹⁷ *Ibid*, hal 21.

¹⁸ A.Widiada Gunakarya, *Op.cit*, hal 59.

Jadi, tidak saja masyarakat diayomi terhadap diulangnya perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang yang telah tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal sebagai warga, yang berguna di dalam masyarakat.

Pasal 54 Konsep KUHP 2006 menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah¹⁹ :

- (1) Pemidanaan bertujuan :
 - a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
 - d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- (2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Menurut **Barda Nawawi Arief**, inti tujuan pemidanaan dalam Konsep KUHP mengandung dua aspek, yaitu²⁰ :

1. Aspek Perlindungan Masyarakat (Kepentingan Umum), khususnya :
 - Pencegahan kejahatan,
 - Pengamanan (pengayoman) masyarakat,
 - Pemulihan keseimbangan masyarakat :
 - penyelesaian konflik (*conflict opplossing*) dan
 - mendatangkan rasa damai (*vredemaking*)
2. Aspek Perlindungan (Pembinaan) Individu :
 - Memasyarakatkan terpidana (resosialisasi/rehabilitasi)
 - Membebaskan rasa bersalah
 - Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia (perlindungan terhadap sanksi yang sewenang-wenang/bersifat pembalasan)

¹⁹ Konsep KUHP Baru 2006, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), hal 13.

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Bahan Kuliah Politik Hukum Pidana*, Magister Ilmu Hukum UNDIP.

Jadi, adanya pembinaan yang berorientasi pada perlindungan atau pembinaan pelaku kejahatan sangat penting. Dengan dilakukannya pembinaan yang bersumber kepada pelaku atau individu, maka muncul istilah *individual treatment model* atau model pembinaan perorangan. Khusus bagi anak, hal tersebut menjadi suatu keharusan karena anak sebagai pelaku kejahatan memerlukan pembinaan lebih khusus daripada orang dewasa. Pembinaan itu dilakukan dengan usaha agar anak dapat menjadi lebih baik khususnya setelah ia kembali ke dalam masyarakat.

Anak sebagai individu yang melakukan suatu kejahatan, maka ia disebut orang yang menderita sakit, sakitnya individu tersebut dapat digolongkan oleh sakit fisik, sakit psikis, sakit sosial, dan sakit kultural. Untuk menghilangkan rasa sakit pada anak tentunya harus diobati dengan cara medik terapeutik dan diobati dengan cara pembinaan atau *treatment* secara perorangan atau *individual*.

Di negara-negara Eropa, pembinaan ini dikenal dengan model kesejahteraan anak. Hal tersebut berangkat dari pandangan bahwa kejahatan atau delinkuensi anak tidak dipertimbangkan atau diharapkan pada perangkat nilai-nilai, melainkan lebih dilihat sebagai tanda tidak fungsionalnya sosialisasi. Jadi dibutuhkan suatu cara untuk memperbaiki perilaku anak yang menyimpang yaitu lewat pemberian sanksi dan pembinaan terhadap anak nakal.

Pembinaan yang ditujukan bagi anak dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Lembaga Pemasyarakatan Anak, adalah tempat pendidikan dan pembinaan bagi :

1. Anak Pidana;
2. Anak Negara; dan
3. Anak Sipil.²¹

Penempatannya dilakukan terpisah dari narapidana dewasa sesuai Pasal 60 Undang-Undang No.3 Tahun 1997. Bagi Anak Pidana yang belum selesai menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Anak dan telah berumur 18 (delapan belas) tahun, akan tetapi belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dipindahkan dari Lembaga Pemasyarakatan Anak ke Lembaga Pemasyarakatan. Akan tetapi ditempatkan secara terpisah dengan narapidana yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.²²

Pembinaan yang diberikan kepada anak harus memperhatikan mengenai klasifikasi umur, latar belakang anak melakukan tindak pidana, berat ringannya perbuatan yang dilakukan, dan sebagainya. Hal tersebut agar anak sebagai penghuni tidak kehilangan haknya sebagai anak. Selain itu, di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA), anak juga mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan dan latihan baik formal maupun informal sesuai dengan bakat dan kemampuannya, serta memperoleh hak-hak lainnya.

Jadi dapat dikatakan Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) adalah tempat terakhir yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya pembinaan

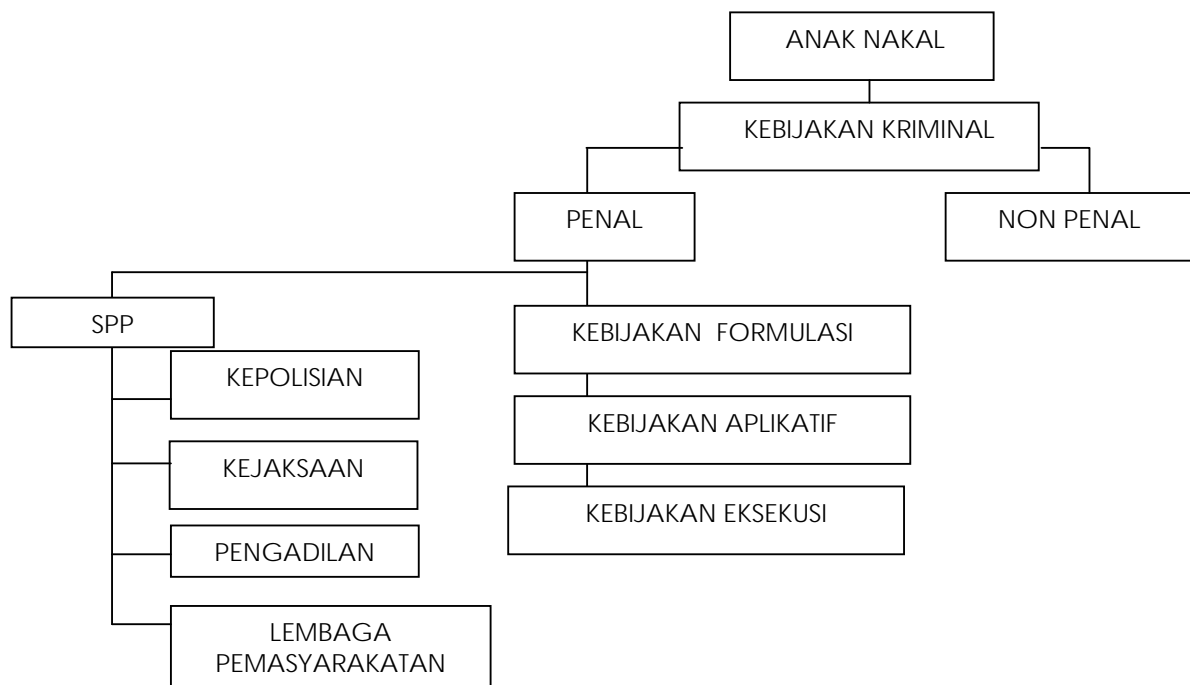
²¹ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 1997), hal 57.

²² *Ibid*, hal 57.

yang dilakukan terhadap anak. Berhasil berarti anak tersebut dapat berubah dan tentunya dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat sedangkan tidak berhasil apabila anak tersebut tidak menunjukkan perubahan sikap dan tingkah laku ketika ia telah selesai menjalani hukuman, akibatnya anak tersebut melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang lagi.

Dalam penulisan tesis ini, penulis membuat skema berpikir yang akan digunakan untuk memudahkan penulis dalam menemukan jawaban atas permasalahan yang ada.

Skema berpikir yang akan digunakan adalah sebagai berikut :



Sudarto pernah mengemukakan 3 (tiga) arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu :

1. *dalam arti sempit*, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;

2. *dalam arti luas*, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. *dalam arti paling luas*, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.²³

Pembinaan yang dilakukan terhadap anak dapat dilakukan melalui kebijakan penal. Kebijakan penal (*penal policy*) menurut **Marc Ancel** adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.²⁴

Kebijakan penal atau *penal policy*, operasionalisasinya dilaksanakan melalui beberapa tahap :

1. tahap formulasi (kebijakan legislatif);
2. tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial);
3. tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).²⁵

Kebijakan penal dilaksanakan oleh suatu sistem yang disebut dengan Sistem Peradilan Pidana atau disingkat SPP yang terdiri dari sub sistem-sub sistem, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Pengertian sistem menurut **Loebby Loqman** adalah suatu rangkaian antara unsur atau faktor yang saling terkait antara satu dengan

²³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2002), hal 1.

²⁴ *Ibid*, hal 21.

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta : Kencana, 2008), hal 79.

lainnya sehingga menciptakan suatu mekanisme sedemikian rupa, sehingga sampai tujuan dari sistem tersebut. Adanya kelemahan atau kerusakan salah satu faktor dalam sistem tersebut akan menyebabkan rusaknya sistem dalam arti keseluruhan, sehingga tujuan sistem tidak akan tercapai.²⁶

Suatu sistem harus bekerja bersama-sama agar tercipta tujuan. Dari sub sistem Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan akan mentransformasikan masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*) yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana yang berupa resosialisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah) dan kesejahteraan sosial (jangka panjang).

Sistem peradilan pidana di Indonesia terbagi dalam tiga tahap yaitu :

1. Tahap sebelum sidang pengadilan (*pre-ajudication*)
2. Tahap pengadilan (*ajudication*)
3. Tahap setelah pengadilan (*post-ajudication*)

Kepolisian dan kejaksaan berada dalam tahap *pre-ajudication* dimana masing-masing sub sistem untuk menanggulangi kejahatan serta mengendalikan terjadinya kejahatan. Pengadilan berada dalam tahap *ajudication* dan pemasyarakatan berada dalam tahap *post-ajudication*. Jadi kinerja dari masing-masing sub sistem sangat berpengaruh khususnya melalui *input* dari sub sistem sebelumnya.

Penjabaran dari skema ini membahas tentang Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan tahap terakhir dari Sistem Peradilan Pidana. Oleh karena itu,

²⁶ Loebby Loqman, *HAM Hak Asasi Manusia dalam HAP Hukum Acara Pidana*, (Jakarta : Datacom, 2002), hal 22.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan unsur yang sangat penting. Dengan ditempatkannya seseorang yang telah dijatuhi hukuman akibat perbuatan pidana yang dilakukannya berarti orang tersebut harus menjalani kehidupannya untuk sementara waktu di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini juga berlaku bagi anak.

Anak yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang, pembinaannya dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA). Dengan demikian, pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan (LPA) harus dilaksanakan dengan baik dengan tetap memperhatikan kebutuhan-kebutuhan anak. Disini sangat diharapkan kinerja Lembaga Pemasyarakatan khususnya Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) untuk menghasilkan *output* yang baik sehingga dapat berpengaruh pada jiwa dan kehidupan anak khususnya ketika anak tersebut telah selesai menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) dan telah siap kembali ke dalam masyarakat. Oleh karena itu, pembinaan terhadap anak harus diimbangi dengan dipenuhinya hak-hak anak sebagai anak seperti anak lainnya, misalnya hak memperoleh pendidikan, hak untuk memperoleh keterampilan, dan sebagainya. Selain itu, harus diberikan pembinaan yang berorientasi bagi anak sehingga memungkinkan anak berubah menjadi lebih baik.

Jadi, dapat dikatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub sistem terakhir dari sub sistem lain diatasnya mempunyai peranan yang sangat penting dalam menciptakan perubahan sikap dan tingkah laku seseorang yang telah

mendapatkan pembinaan dengan baik dan bersiap untuk melanjutkan kehidupannya di luar Lembaga Pemasyarakatan.

F. Metode Penelitian

Suatu penulisan karya ilmiah agar dapat dipertanggungjawabkan dan dapat berguna bagi ilmu pengetahuan, maka harus didasarkan pada kenyataan-kenyataan yang ada. Untuk dapat mencapai hal yang demikian, maka penulis memerlukan kegiatan penelitian dengan mendasarkan kepada penelitian di lapangan (*field research*) maupun pada penelitian kepustakaan (*library research*).

Suatu penelitian juga memerlukan metode-metode tertentu. Metode yang akan diterapkan ini harus disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Penelitian harus berdasarkan penggunaan dari metode-metode penelitian sehingga dalam kegiatan penelitian dapat mengarah pada tujuan yang telah ditentukan.

Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat peranan dan fungsi metodologi dalam penelitian menurut **Soerjono Soekanto** yang menyatakan bahwa metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.²⁷

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1984), hal : 47.

1. Metode Pendekatan :

Pendekatan terhadap masalah ini adalah pendekatan yuridis empiris. Secara yuridis karena permasalahan yang akan diteliti adalah norma-norma hukum yang berlaku dan pelaksanaannya. Jadi hukum diidentikan sebagai norma peraturan atau peraturan perundang-undangan.²⁸

Secara empiris karena hukum itu diidentikan sebagai perilaku mempola dan pemahaman makna sosial.²⁹ Pendekatan empiris ini dapat digunakan untuk mengetahui pembinaan terhadap anak nakal dan untuk menemukan kendala-kendala yang muncul mengenai pembinaan terhadap anak nakal.

2. Spesifikasi Penelitian :

Spesifikasi penelitian yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini adalah spesifikasi penelitian deskriptif analitis.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.³⁰

3. Jenis Data :

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

- (1) data sekunder yaitu data yang diperoleh penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat, tulisan

²⁸ Paulus Hadisuprpto, *Ilmu Hukum dan Pendekatannya*, (Makalah pada Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 17 Januari 2006), hal 17.

²⁹ *ibid.*

³⁰ Amiruddin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 2004), hal : 25.

para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.³¹

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

(2) data primer yaitu data yang diperoleh melalui studi lapangan untuk mendapatkan data secara langsung dari responden yang merupakan objek penelitian dengan cara melakukan wawancara langsung. Data primer ini diperoleh dari penelitian lapangan, berkomunikasi secara langsung dengan responden yang berada di lokasi penelitian.³²

- Responden dalam penelitian ini adalah :
 - anak didik pemasyarakatan yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA).
 - petugas pembimbing pemasyarakatan
- Lokasi penelitian yang dilakukan adalah:
 - Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo
 - Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dalam bentuk tanya jawab bebas terpimpin. Maksudnya adalah dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan

³¹ *Ibid*, hal 65.

³² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), hal 65.

sebagai pedoman, namun demikian tidak menutup kemungkinan adanya variasi-variasi pertanyaan ketika wawancara dilakukan. Dengan teknik ini, unsur kebebasan masih dipertahankan.³³

4. Metode Penentuan Sampel :

Populasi penelitian ini adalah anak binaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo dan Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang yang masing-masing berjumlah 50 (lima puluh) orang dan aparat petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) berkaitan dengan tugasnya melakukan pembinaan terhadap anak nakal di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA).

Adapun komposisi sampel yaitu :

- Petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) : 1 (satu) orang
- Anak binaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) : 50 (lima puluh) orang

Dalam penarikan sampel digunakan teknik *purposive sampling*, yakni pengambilan sampel dengan tujuan tertentu. Keuntungan dari teknik ini ialah pada ketepatan peneliti memilih sumber data sesuai dengan variabel yang diteliti.³⁴

³³ *Ibid*, hal 73.

³⁴ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung :Mandar Maju, 1995), hal 74.

5. Metode Analisis Data :

Seluruh data yang akan diperoleh dari penelitian ini akan dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif dilakukan dengan menggolong-golongkan dari variasi tingkatan yang ada dengan kenyataan. Sedangkan secara kualitatif yaitu dengan mengkaji data-data yang didapat secara sistematis serta konsisten untuk mencapai suatu kejelasan dari permasalahan yang akan dibahas.³⁵

Dari hasil analisis tersebut akan ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini disajikan dalam bentuk rangkaian bab-bab, yang terdiri dari 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, bab ini terdiri dari 7 (tujuh) sub bab, yaitu sub bab a tentang latar belakang masalah, sub bab b tentang permasalahan, sub bab c tentang tujuan penelitian, sub bab d tentang kegunaan penelitian, sub bab e tentang kerangka pemikiran, dan sub bab f tentang metode penelitian, sub bab g tentang sistematika penulisan tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini terdiri dari terdiri dari 5 (lima) sub bab, yaitu sub bab a tentang pengertian anak, anak nakal, dan kenakalan anak, sub bab b tentang tentang Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sub bab c tentang sistem pemasyarakatan anak, sub bab d tentang model pembinaan anak individual atau perorangan.

³⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT.Rineka Cipta, 2004), hal 20.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab yaitu sub bab a tentang pelaksanaan *individual treatment model* dalam pembinaan anak nakal di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA), sub bab b tentang kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan *individual treatment model* terhadap anak nakal di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA), sub bab c tentang bentuk model alternatif lain dalam pembinaan anak nakal di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA).

Bab IV Penutup, bab ini terdiri dari kesimpulan serta saran yang merupakan sumbangan pemikiran penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak, Anak Nakal, dan Kenakalan Anak.

1. Pengertian Anak

Anak sebagai generasi masa depan harus diperhatikan perkembangannya. Perhatian yang diberikan oleh para pihak khususnya orang tua dapat menjadikan anak tersebut berkembang dengan baik. Akan tetapi sebaliknya, jika orang tua kurang memberi perhatian kepada anak, maka anak tersebut dapat menjadi anak kurang perhatian sehingga mendorong dirinya untuk melakukan hal-hal yang tidak baik.

Menurut hukum adat tidak ada ketentuan yang pasti kapan seseorang dapat dianggap tidak dewasa dan wenang bertindak. Hasil penelitian **Mr.R.Soepomo** tentang hukum perdata Jawa Barat dijelaskan bahwa ukuran kedewasaan seseorang diukur dari segi :

1. dapat bekerja sendiri (mandiri);
2. cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab;
3. dapat mengurus harta kekayaannya sendiri.

Sebagai kesimpulan dapat dikatakan bahwa dalam hukum adat ukuran kedewasaan tidak berdasarkan hitungan usia tapi pada ciri tertentu yang nyata.³⁶

³⁶ Irma Setyowati Sumitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hal 19.

Dalam Pasal 330 KUHPerdata mengatakan bahwa anak atau belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak terlebih dahulu telah kawin.

Definisi anak dalam *Rule 2.2 (a) The Beijing Rules*,

*“ A juvenile is a child or young person who, under the respective legal system, may be dealt with for an offence in a manner which is different from adult “*³⁷

(Juvenile adalah anak atau remaja yang menurut sistem hukum yang berlaku, telah melakukan kejahatan yang perlakuannya harus berbeda dengan perlakuan terhadap orang dewasa).

Menurut Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 butir 2, yang dimaksud anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 butir 1, merumuskan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 butir 1, merumuskan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

³⁷ Lihat Lampiran United Nations Standards Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules). Adopted by General Assembly Resolution 40/33 of 29 November 1985.

2. Anak Nakal

Menurut *Rule 2.2 (c) The Beijing Rules*,

“ *A juvenile offender is a child or young person is alleged to have committed or who has been found to have committed an offence*”³⁸

(Anak nakal adalah orang muda yang dinyatakan atau diduga keras telah melakukan atau didapati telah melakukan suatu pelanggaran).

Menurut Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,

Pasal 1 butir 2, yang dimaksud anak nakal adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

3. Kenakalan Anak

Kenakalan anak diambil dari istilah asing *Juvenile Delinquency*. *Juvenile* artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *delinquency* artinya *doing wrong*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.³⁹

Paul Moedikno memberikan perumusan, mengenai pengertian *juvenile delinquency*, yaitu sebagai berikut :⁴⁰

³⁸ Lihat Lampiran United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules), Adopted by General Assembly resolution 40/33 of 29 November 1985.

³⁹ Wagati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung : Refika Aditama, 2006), hal 8-9.

⁴⁰ *Ibid*, hal 9.

- a. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquency*. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan sebagainya.
- b. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya memakai celana jangki tidak sopan, mode *you can see*, dan sebagainya.
- c. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis, dan lain-lain.

Menurut **Kartini Kartono**, *juvenile delinquency* ialah kejahatan/kenakalan anak-anak muda; merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.⁴¹

Menurut **Fuad Hassan**, yang dikatakan *juvenile delinquency* adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh remaja, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa maka dikualifikasikan sebagai kejahatan.⁴²

Dari pendapat-pendapat para ahli maupun yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dapat dikatakan bahwa ada kesamaan, khususnya mengenai pengertian anak nakal. Jadi anak nakal pada dasarnya merupakan anak yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan ataupun melanggar norma-norma yang ada dan pelaku dari perbuatan tersebut adalah orang yang belum dewasa dan belum pernah kawin.

⁴¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2008), hal 6.

⁴² Wagianti Soetodjo, *Op.cit*, hal 10.

B. Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Penanganan perkara yang ditimbulkan oleh anak-anak diatur dalam suatu undang-undang yaitu Undang-Undang No.3 Tahun 1997. Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak disahkan pada tanggal 3 Januari 1997, dimuat dalam Lembaran Negara RI Tahun 1997 No.3 dan Tambahan Lembaran Negara RI No. 3668. Undang-Undang ini diberlakukan satu tahun setelah diundangkan, yakni mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 1998.

Latar belakang lahirnya Undang-Undang Pengadilan Anak, disebutkan dalam konsideransnya menyebutkan :

- a. bahwa anak adalah bagian dari generasi muda salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi selaras dan seimbang.
- b. bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.

Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain perubahan zaman yang dapat

mengakibatkan perubahan gaya hidup orang tua yang berpengaruh pada anak, kemajuan teknologi, pergaulan yang semakin luas akibat kurangnya pengawasan, dan sebagainya. Kesemuanya itu tentu dapat mempengaruhi sikap dan perilaku anak.

Dengan adanya Undang-Undang Pengadilan Anak, diharapkan dapat menangani masalah perkara anak, mulai dari tingkat pertama sampai tingkat terakhir dan kepentingan si anak tetap dapat terlindungi hak-haknya.

C. Gambaran tentang Sistem Pemasyarakatan

1. Sistem Pemasyarakatan Anak

Berbicara mengenai sistem pemasyarakatan maka terlebih dahulu perlu diketahui mengenai pemasyarakatan. Pengaturan mengenai pemasyarakatan tercantum dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995. Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 angka 1 menjelaskan tentang definisi pemasyarakatan yaitu kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Jadi pemasyarakatan mempunyai makna pembinaan terhadap narapidana supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat. pembinaan itu dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh suatu sistem yang dinamakan sistem pemasyarakatan.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan ditujukan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan harus didasarkan pada suatu asas yang harus dipegang oleh para pembina agar dapat tercapai tujuan dari pembinaan itu sendiri. Dalam Pasal 5 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, disebutkan 7 (tujuh) asas sistem pembinaan pemasyarakatan, yaitu ⁴³:

- a. Pengayoman
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c. Pendidikan
- d. Pembimbingan
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

⁴³ Lihat Lampiran Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Penjelasan dari asas pembinaan pemasyarakatan adalah sebagai berikut :

Ad.a. Yang dimaksud dengan pengayoman adalah perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidup kepada warga binaan pemasyarakatan agar mereka menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat nantinya.

Jadi asas ini dilaksanakan untuk kepentingan mengayomi masyarakat secara umum, karena masih berkaitan erat dengan fungsi hukum untuk melindungi masyarakat. Di samping itu secara implisit termasuk pula perlakuan pengayoman terhadap para narapidana selama mereka menjalani pidananya di LAPAS karena sebagai warga binaan mereka harus dilindungi, LAPAS bukan tempat untuk pembalasan dendam narapidana yang telah melakukan kesalahan.

Ad.b. Asas yang kedua ini dimaksudkan agar para pembina pemasyarakatan memberikan perlakuan dan pelayanan yang sama terhadap warga binaannya tanpa membedakan orang. Asas ini sejalan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa semua warga negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Dalam melakukan pembinaan tidak boleh membedakan narapidana yang berasal dari kalangan orang kaya atau orang miskin, tidak boleh membedakan narapidana yang mempunyai keluarga pejabat atau tidak, dan sebagainya.

Ad.c dan d. Dalam penyelenggaraan pembinaan terhadap narapidana dengan dasar mendidik dan membimbing mereka, pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

Dengan menanamkan jiwa kekeluargaan kepada mereka, diharapkan tumbuh sikap kekeluargaan antara narapidana dengan pembina atau pejabat/pegawai LAPAS dan antara sesama narapidana, sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan baik.

Kemudian untuk mendidik dan membimbing keterampilan, selalu untuk menghilangkan rasa jemu berada di LAPAS, tujuan pokoknya adalah memberikan bekal pengetahuan kepada narapidana supaya mereka terampil dalam melakukan pekerjaan, sehingga setelah selesai menjalani pidananya, mereka tidak menemui kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

Adapun menyelenggarakan pendidikan kerohanian dan memberi kesempatan untuk menunaikan ibadah, agar mereka mempunyai pengetahuan agama yang dianutnya secara baik, dan dengan

menunaikan ibadah mereka akan mendekatkan diri kepada Tuhan dan bertobat.

Ad.e.Asas penghormatan harkat dan martabat manusia ditegaskan dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, dimaksudkan agar dalam melaksanakan pembinaan tetap harus memperlakukan warga yang dibina sebagaimana layaknya manusia. Meskipun narapidana adalah orang yang telah melakukan kesalahan, sebesar apapun kesalahannya dan macam apapun yang dilakukannya, mereka tetap manusia. Sebagai manusia harus tetap dihormati harkat dan martabatnya. Apabila hal ini dilalaikan, yang terjadi adalah pelanggaran hak asasi manusia.

Ad.f.Asas kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan menurut penjelasan undang-undang, bahwa warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaiki.

Seseorang yang dihukum pidana penjara atau kurungan harus menjalani pidananya di LAPAS. Selama berada di LAPAS inilah yang merupakan kehilangan kemerdekaannya. Artinya, ia tidak bebas pergi kemana-mana, menengok keluarga, atau melakukan kegiatan lainnya di luar LAPAS. Penderitaan itu tidak boleh ditambah sewaktu berada di LAPAS, karena selama di LAPAS tujuannya untuk kepentingan memperbaiki kesalahannya.

Walaupun kehilangan kemerdekaannya, akan tetapi tetap dilindungi haknya, seperti hak mendapat perawatan kesehatan, makan, minum, tempat tidur, olahraga, dan sebagainya.

Ad.g.Selama narapidana mendapat pembinaan di LAPAS, mereka tetap dijamin haknya untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Pada prinsipnya untuk membina narapidana tidak boleh diasingkan sama sekali dengan masyarakat. Mereka diperbolehkan menemui dan berbicara dengan keluarga yang datang berkunjung di LAPAS. Kunjungan keluarga itu dapat memberi semangat untuk hidup sementara di dalam LAPAS, karena mereka merasa tidak ditinggalkan oleh keluarga dan tetap mendapat perhatian keluarganya.

Adanya asas-asas pembinaan pemasyarakatan diharapkan dapat menjadikan penghuni pemasyarakatan menjadi manusia yang lebih baik, menyadari kesalahannya, dan tidak mengulangi perbuatannya lagi sehingga sekembalinya ia dari menjalani hukumannya, ia dapat diterima kembali dalam masyarakat.

Sebenarnya narapidana dan anak didik pemasyarakatan pada dasarnya sama karena mereka sama-sama orang yang dipidana oleh pengadilan dan menghuni di LAPAS. Akan tetapi undang-undang ini menghendaki perbedaannya. Meskipun undang-undang tidak memberi penjelasan, dapat diketahui bahwa istilah narapidana dipergunakan untuk terpidana dewasa, sedangkan istilah anak didik pemasyarakatan untuk terpidana anak. Tidak dipergunakan istilah narapidana untuk anak karena dipengaruhi gaya bahasa *eufemismus*. Dengan menggunakan anak didik pemasyarakatan tersebut merupakan ungkapan halus untuk narapidana anak yang dirasakan menyinggung perasaan atau mensugestikan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi anak.

Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No.12 Tahun 1995, dikenal 3 (tiga) macam anak didik pemasyarakatan, adalah :

- a. Anak pidana
- b. Anak negara
- c. Anak sipil

Penjelasan⁴⁴ :

Ad.a. Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LPA anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Apabila anak ini telah berumur 18 tahun dan belum selesai menjalani pidananya di LPA Anak, sesuai Pasal 61 Undang-Undang Pengadilan Anak harus dipindahkan ke LPA. Bagi anak pidana yang ditempatkan di LPA karena umurnya sudah mencapai 18 tahun tetapi belum mencapai 21 tahun, tempatnya dipisahkan dengan narapidana yang telah berumur 21 tahun. Pihak LPA wajib menyediakan blok tertentu untuk mereka yang telah mencapai 18 tahun sampai dengan 21 tahun.

⁴⁴ Gatot Supramono, *Op.cit*, hal 120-122.

Bagi anak pidana yang telah menjalani pidana penjara 2/3 (dua per tiga) dari pidana yang dijatuhkan yang sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan dan berkelakuan baik, dapat diberikan pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat dimaksud disertai dengan masa percobaan yang lamanya sama dengan sisa pidana yang harus dijalankannya. Dalam pembebasan bersyarat sesuai dengan Pasal 62 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Anak ditentukan syarat umum dan syarat khusus seperti yang diatur dalam Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4), adalah :

- a. syarat umum, yaitu bahwa anak pidana tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani pembebasan bersyarat.
- b. syarat khusus, yaitu syarat yang menentukan bahwa untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam pembebasan bersyarat dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.

Ad.b.Anak negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LPA Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Berhubung ketentuannya sampai berumur 18 tahun, maka jika umurnya telah telah melewati batas umur tersebut, anak negara tidak dipindahkan ke LPA, karena anak ini tidak dijatuhi pidana penjara. Hukumnya dijalani sampai disitu. Selama anak negara berada di LPA Anak, dan telah menjalani masa pendidikannya paling sedikit selama satu tahun, serta berkelakuan baik sehingga tidak memerlukan pembinaan lagi, maka Kepala LPA Anak dapat mengajukan izin kepada Menteri Hukum dan HAM agar anak tersebut dapat dikeluarkan dari LPA dengan atau tanpa syarat yang ditetapkan Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Anak.

Jadi walaupun anak negara belum mencapai umur 18 tahun tetapi sudah tidak memerlukan pembinaan lagi, Menteri Hukum dan HAM dapat mengeluarkan anak tersebut atas dasar prosedur seperti diatas.

Ad.c.Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LPA Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Penempatan anak sipil di LPA Anak paling lama enam bulan bagi mereka yang pada saat penetapan pengadilan berumur 14 tahun dan setiap kali dapat diperpanjang selama satu tahun dengan ketentuan paling lama berumur 18 tahun (Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Pemasysarakatan).

2. Lembaga Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana

Mardjono Reksodiputro mengemukakan pengertian tentang sistem peradilan pidana Indonesia sebagai sistem pengendalian kejahatan yang terdiri atas Lembaga-Lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan Terpidana.⁴⁵

Muladi tidak memberikan pengertian yang tegas mengenai sistem peradilan pidana. Menurut **Muladi**, sistem peradilan didalamnya terkandung gerak sistemik dari sub sistem-sub sistem pendukungnya yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga koreksi (Lembaga Pemasyarakatan) yang secara keseluruhan dan merupakan satu totalitas berusaha mentransformasikan masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*) yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana yang berupa resosialisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah) dan kesejahteraan sosial (jangka panjang).⁴⁶

Lembaga Pemasyarakatan sebagai unsur terakhir dari sistem peradilan pidana harus mendapat kebutuhan yang sama dengan sub sistem-sub sistem lainnya dalam sistem peradilan pidana.

Hal tersebut dikarenakan sebagai suatu sistem, maka harus terdapat keterpaduan diantara sub sistem-sub sistem lainnya. Selanjutnya menurut **Muladi** ditegaskan bahwa yang harus dilihat atau diperhatikan dari sistem peradilan pidana adalah eksistensi sistem peradilan pidana. pemahaman sistem harus dilihat dalam konteks baik sebagai *physical system*, yaitu seperangkat

⁴⁵ Diktat Akpol, *op.cit*, hal 4.

⁴⁶ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hal vii.

elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai tujuan, maupun sebagai *abstract system*, dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur, yang satu sama lain berbeda, tetapi saling tergantung.⁴⁷

Sebagai lembaga yang bertugas untuk melaksanakan pembinaan, maka Lembaga Pemasyarakatan mempunyai posisi yang strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum. Keberhasilan dan kegagalan pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan akan memberikan kemungkinan-kemungkinan penilaian yang dapat bersifat positif maupun negatif. Penilaian itu dapat bersifat positif manakala pembinaan narapidana mencapai hasil maksimal, yaitu bekas narapidana menjadi warga masyarakat yang taat pada hukum. Penilaian itu dapat negatif kalau bekas narapidana yang dibina itu menjadi penjahat kembali.⁴⁸

Berbicara mengenai Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA), maka sistem peradilan pidana yang berlaku adalah yang diterapkan dalam kasus mengenai anak nakal. Jadi dapat dikemukakan, bahwa sistem peradilan pidana anak adalah suatu mekanisme untuk menanggulangi kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anak, yang disesuaikan dengan sifat maupun karakteristik dari anak tersebut.

⁴⁷ *Ibid*, hal vii.

⁴⁸ Petrus Irwan. P dan Pandapotan S., *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta : Sinar Harapan, 1996), hal 65.

D. Model Pembinaan Anak Individual atau Perorangan

Salah satu dari tiga paradigma peradilan anak yang menonjol adalah paradigma pembinaan perorangan atau *individual treatment paradigm* yang dikenal dengan model pembinaan yang dilakukan secara perorangan yang ditujukan untuk mengobati seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan.

Model pembinaan perorangan digambarkan bahwa persidangan anak berperan sebagai agensi quasi kesejahteraan dengan mandat peradilan, pembinaan anak pelaku delinkuen berlandaskan asumsi model medik, beranjak pada asumsi sebab-sebab delinkuensi anak. Delinkuensi dipandang sebagai gejala simptomatik. Hakekat dan seriusitas perilaku delinkuensi anak, tidak lebih, dilihat sebagai persoalan yang membutuhkan pelayanan terapitik dalam rangka mengobati gejala sakit pelaku delinkuen.⁴⁹

Model yang dikenal di Eropa sebagai *social welfare model* ini memandang delinkuensi sebagai tanda gagalnya proses sosialisasi dan terlepas dari nilai-nilai substansial. Intervensi berupaya untuk memperbaiki perilaku delinkuensi lewat pemberian reaksi sesuai dengan personalitas dan kebutuhan anak pelaku delinkuen.

Sebenarnya model itu telah mendapat kritikan sebagai tidak adil dan tidak efektif sejak kehadirannya di tahun 1970-an. Ia digambarkan sebagai hal yang bersifat paternalistik, mahal, menimbulkan stigmatisasi dan tidak ada kepastian hukum. Walaupun demikian tampaknya asumsi pelaku

⁴⁹ Paulus Hadisuprpto, *Pemberian Malu Reintegratif sebagai Sarana Nonpenal Penanggulangan Perilaku Delinkuensi Anak*, disertasi doktor (Semarang : Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2002), hal 140.

delinkuen sebagai objek pasif yang membutuhkan pelayanan terapitik masih mendominasi praktek keseharian intervensi peradilan anak.

Secara khusus, misi pembinaan yang menjadi ciri paradigma ini dianggap telah gagal memberikan angka delinkuensi anak. Disamping itu, misi itupun telah gagal untuk menunjukkan keunikan peran peradilan anak sebagai bagian dari penyelamatan publik. Akibatnya, pembuatan keputusan persidangan anak menjadi ambivalent dan tidak konsisten dalam menerapkan sanksi dan menanggapi tuntutan penyelamatan publik.⁵⁰

Pembinaan yang dilakukan berangkat dari satu dimensi saja, yaitu pelaku delinkuen bekerja atas dasar sistem logis yang tertutup, sebagai cenderung gagal untuk memasukkan pihak-pihak lain (korban dan masyarakat) dalam menanggapi delinkuensi lewat proses peradilan anak. Anak pelaku delinkuen cenderung berada dalam posisi pasif, kecuali kesempatannya untuk mengambil langkah aktif atas perilaku delinkuensi yang diperbuatnya atau langkah-langkah lain yang berorientasi pada upaya konsolidasi, rehabilitasi, reintegrasi. Pembinaan tidak mampu mempertemukan kepentingan pelaku, masyarakat, keluarga dan korban.⁵¹

⁵⁰ *Ibid*, hal 140-141.

⁵¹ *Ibid*, hal 144-145.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Pelaksanaan *Individual Treatment Model* dalam Pembinaan Anak Nakal di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA)

1. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang

Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang dibangun diatas tanah seluas 12.150 m² oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1925 dengan maksud dan tujuan adalah untuk mengasingkan orang keturunan orang Belanda yang berbuat nakal. Adapun sejarah institusi ini dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut :

Tahun 1934 : Pengelolaannya diserahkan kepada Pro Juventute

Tahun 1945 s/d 1946 : Menjadi Markas Resimen IV Tangerang

Tahun 1957 : Dikelola oleh Pemerintah RI

Tahun 1959 : Pemerintah menyerahkan pengelolaan lembaga ini kepada Yayasan Prayuna

Tahun 1961 : Karena tidak mampu, Yayasan Pra Yuana menyerahkan kembali kepada negara, dan pengawasannya langsung dibawah jawatan kepenjaraan. Namanya berubah menjadi Rumah Pendidikan Negara.

Pada tanggal 27 April 1964 (hari lahirnya Sistem Pemasyarakatan) istilah kepenjaraan diganti dengan Pemasyarakatan. Dengan adanya perubahan istilah tersebut, maka nama institusi ini diganti dengan nama

Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Negara Pria dan berada dibawah Direktorat Jenderal Tuna Warga, Departemen Kehakiman RI.

Kemudian dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No: M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, nama tersebut berubah lagi menjadi Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang, dibawah pengawasan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman RI.

Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang mempunyai visi yaitu memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan anak didik pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Disamping itu, Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang juga mempunyai misi yaitu :

- a. mewujudkan sistem yang menumbuhkan rasa aman bagi anak didik baik secara fisik maupun psikis, bebas gangguan internal dan eksternal;
- b. melaksanakan perawatan, pelayanan, pendidikan dan pembimbingan untuk kepentingan terbaik bagi anak di masa pertumbuhannya;
- c. Menumbuhkembangkan ketaqwaan, kecerdasan, kesantunan, dan keceriaan anak agar dapat menjadi manusia mandiri dan bertanggung jawab.

Saat ini Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang berada dibawah Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Banten. Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang berlokasi di Jalan Daan

Mogot No.29 c, Tangerang. Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang merupakan Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) terbesar yang mempunyai kapasitas huni 220 anak dan saat ini dihuni oleh 240 anak.

Klasifikasi kejahatan yang dilakukan oleh anak yang terdapat dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang adalah sebagaimana yang digambarkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1
Data Anak Didik Berdasarkan Klasifikasi Kejahatan Anak
di LPA Pria Tangerang

No	Tindak Pidana	Pasal	Jumlah	%
1.	Ketertiban	154-181	15	6,25 %
2.	Kesusilaan	281-297	14	5,8 %
3.	Perjudian	303	1	0,4 %
4.	Penculikan	324-336	1	0,4 %
5.	Pembunuhan	338-340	20	8,3 %
6.	Penganiyaan	351-358	5	2 %
7.	Pencurian	362-364	38	15,8 %
8.	Perampokan	365	14	6 %
9.	Penggelapan	372-375	3	1,25 %
10.	Hak Cipta	UU No.19/02	1	0,4 %
11.	Penadahan	480-481	1	0,4 %
12.	Narkotika	UU No.22/97	86	36 %
13.	Psikotropika	UU No.5/97	23	9,5 %
14.	Perlindungan Anak	UU No.23/02	18	7,5 %
JUMLAH			240	100 %

Sumber : data primer, 2008

Berdasarkan tabel mengenai klasifikasi kejahatan, dapat diperoleh hasil bahwa mayoritas perbuatan jahat yang dilakukan oleh anak didik yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang adalah perbuatan menggunakan obat-obatan terlarang atau narkotika. Perbuatan tersebut lebih

dilatarbelakangi oleh gaya hidup anak didik sebagai masyarakat kota yang tinggal jauh dari orang tua sehingga mereka juga dikenal sebagai anak jalanan. Keadaan tersebut juga makin didukung oleh pergaulan yang tidak baik yang membawa mereka ke dalam lingkungan pengguna narkoba. Perbuatan lain yang dilakukan oleh anak didik adalah pencurian. Hal tersebut lebih dilatarbelakangi oleh alasan ekonomi.

Klasifikasi anak berdasarkan usia yang terdapat dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang adalah sebagai berikut :

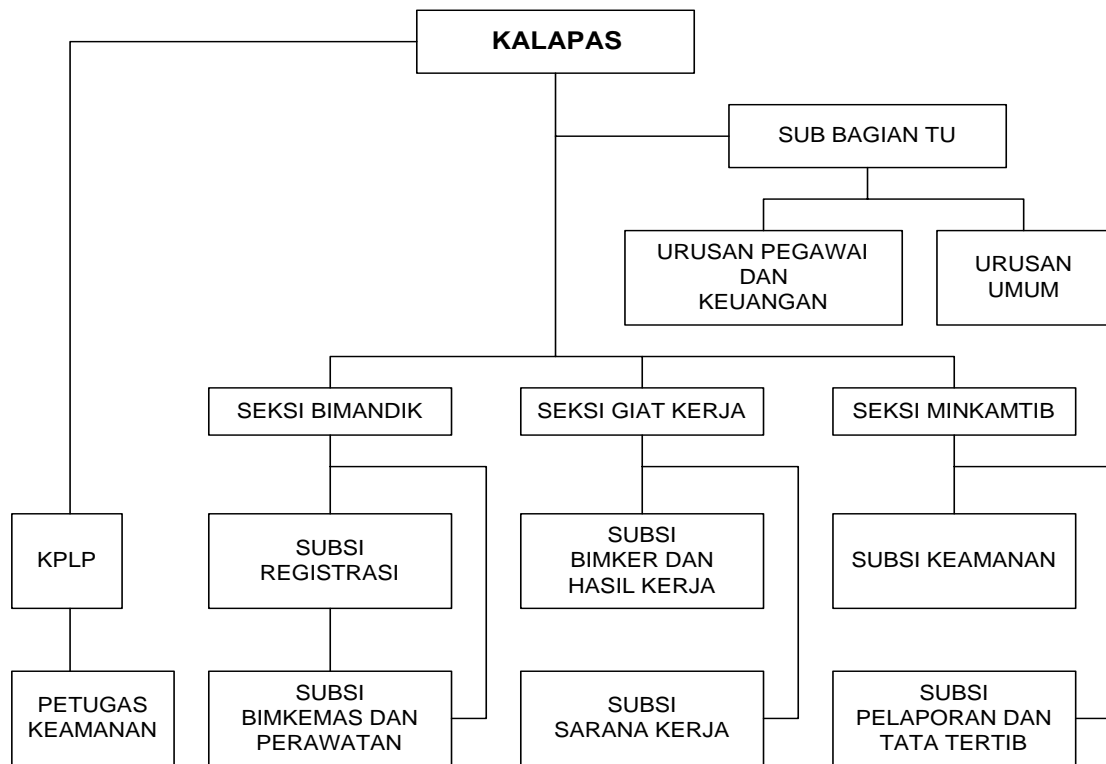
Tabel 2
Data Anak Didik Berdasarkan Klasifikasi Usia
di LPA Pria Tangerang

No	Usia Anak	Jumlah	%
1.	10 – 12 tahun	9	4 %
2.	13 – 15 tahun	61	25 %
3.	16 – 18 tahun	170	71 %
JUMLAH		240	100 %

Sumber : data primer, 2008.

Klasifikasi usia anak didik yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang mulai dari usia 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Mayoritas usia anak didik yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang adalah usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, yaitu sebanyak 170 anak didik. Adapun susunan organisasi dari Lembaga Pemasyarakatan Pria Tangerang adalah seperti dibawah ini :

STRUKTUR ORGANISASI LPA PRIA TANGERANG



Sumber : data sekunder, 2008.

2. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo

Bangunan asli Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo dibangun sejak tahun 1917, yang pada waktu itu digunakan sebagai rumah tawanan perang milik pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1945, bangunan ini menjadi milik Pemerintah Republik Indonesia dalam keadaan kosong. Bangunan ini pernah juga digunakan sebagai tangsi tentara Indonesia pada tahun 1948, yang kemudian dalam tahun itu juga dikembalikan kepada jawatan kepenjaraan untuk digunakan sebagai rumah penjara samapi tahun 1960. Pada tahun 1962 sampai 1964, bangunan ini digunakan sebagai rumah penjara bagi orang-orang jompo.

Kemudian pada tahun 1964, rumah penjara jompo berubah nama menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III. Melalui surat tertanggal 8 Juni Nomor JS. 4/5/16 Tahun 1979, nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas III berubah lagi menjadi Lembaga Pemasyarakatan Anak Negara di Kutoarjo. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 16 Desember 1983 Nomor M.03-UM.01.06 Tahun 1983 Tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu Sebagai Rumah Tahanan (RUTAN) dan Lembaga Pemasyarakatan, maka namanya pun berubah lagi menjadi Cabang RUTAN Purworejo di Kutoarjo. Dengan adanya Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 5 Februari Nomor M.OI-PR.07.03 Tahun 1991 Tentang Pemindahan Tempat Kedudukan Lembaga Pemasyarakatan Anak Jawa Tengah di Ambarawa ke Kutoarjo dan sekaligus Penghapusan Cabang RUTAN Purworejo di Kutoarjo, maka namanya menjadi Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo sampai saat ini.

Dalam melaksanakan pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo mempunyai visi, misi dan tujuan yang hendak dicapai. Adapun visi, misi dan tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Visi

Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo mempunyai visi, yaitu mewujudkan perkembangan perilaku Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai individu yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan

menjadi anggota masyarakat yang mematuhi norma maupun hukum yang berlaku.

b. Misi

Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo mempunyai misi yaitu menjalin dan membentuk anak didik, dengan merawat, mendidik, membimbing serta mengarahkan dalam rangka penegakkan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak.

c. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo adalah sebagai berikut :

1. Menjalin, mengembangkan dan memulihkan perkembangan perilaku anak didik, sehingga dapat bertumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
2. Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak anak.
3. Menjalin jaringan kerja dan bekerja sama dengan semua pihak yang berkepentingan serta terkait untuk perkembangan dan perlindungan anak yang bermasalah dengan hukum.
4. Menumbuh kembangkan kesadaran personil dari Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo dengan masyarakat agar berperan aktif dalam melaksanakan upaya pembinaan terhadap anak yang bermasalah.

Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo berkedudukan di Jalan P. Diponegoro Nomor 36 A Kutoarjo. Lembaga Pemasyarakatan ini merupakan bangunan tua yang sejak pertama kali didirikan belum pernah direnovasi. Kapasitas penghuni yang dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan ini sebanyak 116 orang, tetapi hanya dihuni oleh 73 orang, yang terdiri dari tahanan anak, anak pidana dan anak negara yang berasal dari Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Adapun klasifikasi bentuk kejahatan yang dilakukan oleh anak akan penulis sajikan dalam bentuk tabel berikut ini :

Tabel 3
Data Anak Didik Berdasarkan Klasifikasi Kejahatan Anak
di LPA Kutoarjo

No	Tindak Pidana	Pasal	Jumlah	%
1.	Kesusilaan	281-297	33	45 %
2.	Perjudian	303	2	3 %
3.	Pembunuhan	338-340	12	16 %
4.	Pencurian	362-364	10	14 %
5.	Perampokan	365	4	5 %
6.	Penipuan	376-378	2	3 %
7.	Lain-lain kejahatan *)		10	14 %
JUMLAH			73	100 %

Sumber : data primer, 2008.

*) Lain-lain adalah :

- Pemerasan : 1
- Narkoba : 1
- Pelarian anak : 1

- Pemalsuan uang : 2
- Penganiayaan : 1
- Kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain : 4

Tingkat klasifikasi kejahatan anak yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo sangat beragam. Mayoritas kejahatan yang dilakukan oleh anak adalah kesusilaan. Hal tersebut dikarenakan keadaan dari anak tersebut yang rata-rata berasal dari keluarga yang kurang mampu. Oleh karena itu, banyak anak yang tidak melanjutkan sekolah dan memilih hidup di jalanan. Terkadang akibat pergaulan yang luas, tidak jarang diantara mereka melakukan perbuatan pelanggaran kesusilaan tersebut.

Kejahatan lain yang banyak dilakukan adalah pembunuhan. Dari hasil wawancara terhadap anak didik yang dilakukan, motif anak melakukan pembunuhan adalah karena dendam. Hal tersebut karena sebagai anak belum mempunyai emosi yang stabil. Selain itu, pencurian itu banyak dilakukan oleh anak. Seperti yang telah penulis sebutkan, rata-rata keadaan anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo berasal dari keluarga yang kurang mampu. Jadi, dapat dikatakan motif ekonomi terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup menjadi alasan yang utama.

Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo merupakan Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) yang masih digabung antara anak didik laki-laki dengan anak didik perempuan. Penggabungan ini dikarenakan tidak ada pilihan lain walaupun tempat tinggal atau sel dilakukan secara terpisah. Tetapi untuk kegiatan pembinaan dilakukan secara bersama-sama.

Klasifikasi berdasarkan jenis kelamin anak yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo adalah sebagaimana yang disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4
Data Anak Didik Berdasarkan Klasifikasi Jenis Kelamin
di LPA Kutoarjo

No	Jenis Kelamin	Jumlah	%
1.	Laki-laki	72	99 %
2.	Perempuan	1	1 %
JUMLAH		73	100 %

Sumber : data primer, 2008.

Berdasarkan tabel diatas, mayoritas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak didik di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo banyak dilakukan oleh anak laki-laki walaupun terdapat 1 (satu) orang perempuan. Dari wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan anak didik perempuan tersebut, kejahatan yang dilakukan adalah karena kecelakaan sepeda motor yang menyebabkan kematian seseorang.

Selain jenis kelamin, Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA)Kutoarjo juga membedakan anak didik berdasarkan usia. Hal tersebut sangat penting mengingat dari usia, seorang anak dapat ditentukan mana pembinaan yang cocok untuk anak tersebut. sebagai contoh, anak didik berusia 12 tahun tidak cocok apabila harus dibina atau diikuti program pembinaan bengkel. Disamping itu berdasarkan usia pula ditentukan seorang anak didik itu harus melanjutkan pendidikan formalnya selama di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA). Jadi, aktivitas anak didik yang berada di Lembaga Pemasyarakatan

Anak (LPA) juga harus tetap bersekolah meskipun tidak sama dengan sekolah anak pada umumnya.

Klasifikasi anak berdasarkan usia yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo adalah sebagaimana yang disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 5
Data Anak Didik Berdasarkan Klasifikasi Usia
di LPA Kutoarjo

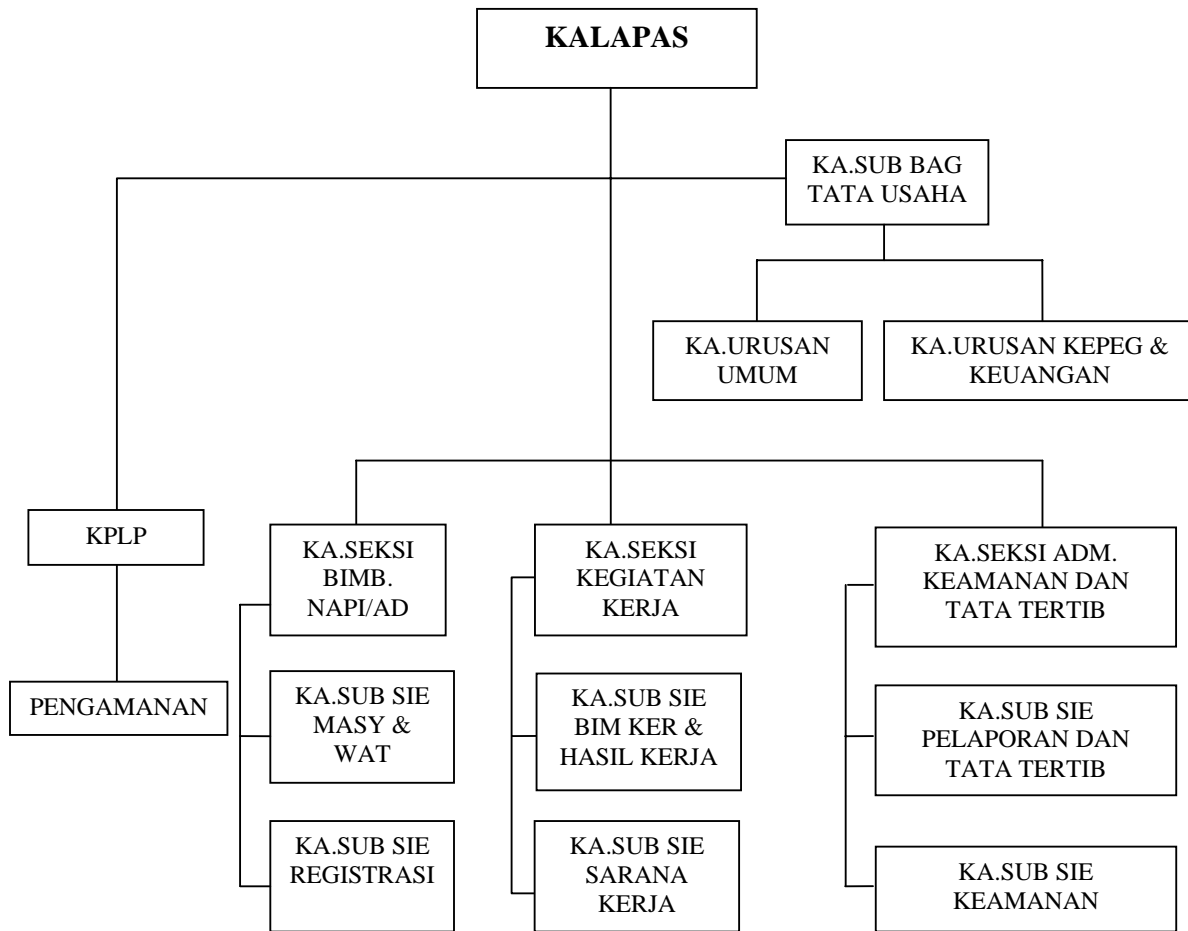
No	Usia Anak	Jumlah	%
1.	10 – 12 tahun	3	4 %
2.	12 – 15 tahun	41	56 %
3.	15 – 18 tahun	29	40 %
JUMLAH		73	100 %

Sumber : data primer, 2008.

Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo sebagai tempat untuk melakukan pembinaan terhadap anak didik menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Pembina Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) melaksanakan tugasnya untuk membina dan anak didik menjalankan kewajibannya dengan baik juga. Oleh karena itu dalam kegiatannya, Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo membutuhkan banyak tenaga pembina yang terampil sebagai satu perangkat kerja yang bersama-sama mewujudkan keberhasilan dari pembinaan terhadap anak didik.

Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo mempunyai susunan struktur perangkat kerja sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI LPA KUTOARJO



Sumber : data sekunder, 2008.

3. Pelaksanaan Pembinaan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang

Pembinaan secara umum

Pembinaan kepada anak didik yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang dilakukan secara menyeluruh. Hal tersebut agar kepentingan anak dan perhatian terhadap anak tetap dapat terpenuhi dengan baik. Menurut **Sondang Pakpahan**⁵², pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang terdiri dari program-program, yaitu sebagai berikut :

1. Pendidikan formal :

Pendidikan formal bagi anak didik di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang merupakan pendidikan formal yang lengkap. Anak didik di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang wajib mengikuti program pendidikan yang sesuai dengan umur, yaitu dimulai dari tingkat Sekolah Dasar (Paket A) yang bekerjasama dengan SD Cengkareng, SMP (Paket B) yang bekerjasama dengan SMPN 2 Tangerang, dan SMU (Paket C) yang merupakan sekolah swasta.

2. Pendidikan non formal :

Pendidikan non formal ditujukan kepada anak didik Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang untuk mengasah bakat dan keterampilan agar mereka mempunyai bekal setelah kembali ke dalam masyarakat. Semua kegiatan yang termasuk dalam pendidikan non formal

⁵² Sondang Pakpahan (Ka Sub Bimbingan dan Perawatan), *Wawancara*, (Tangerang : 3 September 2008)

harus diikuti oleh anak didik di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang.

Adapun kegiatan yang termasuk dalam pendidikan non formal adalah sebagai berikut :

- bengkel atau automotif (kegiatan ini sudah memiliki sertifikat);
- cukur rambut;
- band musik;
- menjahit;
- pertukangan;
- pelatihan pertanian dan peternakan.

(khusus pertanian dan peternakan dilakukan di luar gedung Lembaga Pemasyarakatan Anak tetapi masih dalam wilayah Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang).

3. Program Kerjasama

Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dalam melakukan pembinaan kepada anak didik. Kerjasama itu tercermin dalam pengadaan rumah pintar di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang yang memberikan anak didik keahlian seputar tata boga, membuat batik, salon, melukis, membuat keramik, membuat maket.

Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang sangat mendukung segala macam kegiatan dan program yang ditujukan bagi anak didik.

Bentuk dukungan itu dapat terlihat diantaranya adalah seringnya diikuti berbagai kegiatan di luar Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA), seperti kegiatan band musik yang sering diundang ke acara-acara resmi di Taman Ismail Marzuki, maupun berpentas di Taman Mini dalam rangka Peringatan Hari Anak Nasional, mengadakan pameran seni melukis hasil karya anak didik di Taman Ismail Marzuki, dan sebagainya.

Anak didik yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang sangat menyadari bahwa mereka harus membekali diri mereka sendiri dengan keahlian atau bakat yang belum mereka dapat. Semua itu nantinya dapat menjadi bekal sebelum mereka kembali ke dalam masyarakat.

Setiap anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang diperlakukan dengan sama dan tidak dibedakan sama sekali. Mereka semua mempunyai hak yang sama sebagai penghuni dari Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang. Adapun hak dari anak didik menurut **Sondang Pakpahan** adalah sebagai berikut :⁵³

- a. mendapat pakaian;
- b. beribadah sesuai dengan agama yang dianut;
- c. mendapatkan makanan yang layak, bergizi, higienis;
- d. mendapat pengobatan kesehatan;
- e. mendapat pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal;
- f. berhak untuk dikunjungi orang tua;

⁵³ Sondang Pakpahan (Ka Sub Bimbingan dan Perawatan), *Wawancara*, (Tangerang : 3 September 2008)

- g. berhak untuk menyampaikan pendapat;
- h. berhak untuk cuti mengunjungi keluarga, dengan syarat setelah ia menjalani $\frac{1}{2}$ dari masa pidananya dan ia berkelakuan baik;
- i. berekreasi.

Pemberian hak kepada anak didik harus tetap diberikan yang semuanya ditujukan demi kepentingan terbaik anak didik, dan tentunya untuk memberikan rasa nyaman kepada anak didik karena ia harus melewati masa mudanya di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang.

Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Tangerang sangat menyadari kedudukannya sebagai Lembaga Pemasyarakatan Anak terbesar di Indonesia. Bentuk kegiatan dan pembinaan yang ditujukan bagi anak didik dirasa oleh penulis sudah sangat lengkap bahkan tidak jarang pembina mengajak para anak didiknya untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan di luar Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang, seperti kegiatan band musik, dan pameran melukis. Hal tersebut secara tidak langsung juga dapat bermanfaat bagi anak didik dalam perbaikan sikap dan tingkah lakunya. Anak didik dapat berinteraksi dengan orang lainnya yang hadir dalam pertunjukan band musik maupun di pameran melukis. Anak didik juga dapat merasakan bahwa mereka tidak dibedakan dari anak yang lainnya. Di samping itu, kegiatan semacam ini juga dapat mengurangi rasa jenuh dan kebosanan anak didik yang terus-menerus berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang.

Pembinaan secara individual atau perorangan

Pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang pada dasarnya bertujuan untuk memberikan anak didik suatu keahlian yang dapat digunakan sebagai bekal pada waktu anak didik selesai menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA). Dengan adanya program-program pembinaan yang telah diadakan untuk anak didik, maka menjadikan suatu keharusan bagi anak didik itu untuk melaksanakan dan berpartisipasi dalam program pembinaan itu. Program-program pembinaan yang ditujukan bagi anak didik diikuti oleh anak didik dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA).

Pembinaan lainnya, yang ditujukan khususnya bagi pemulihan sikap dan mental dari anak didik adalah pembinaan anak yang dilaksanakan secara individual. Pembinaan ini sangatlah penting karena dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) terdapat berbagai macam sifat dari anak didik yang tentunya membutuhkan suatu pembinaan yang berbeda terutama pembinaan yang ditujukan untuk perbaikan diri anak didik itu sendiri.

Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang mempunyai program pembinaan yang secara khusus berorientasi pada individu atau perorangan.

Bentuk pembinaan itu adalah :

1. Konseling

Pembinaan ini lebih memperhatikan segala aspek yang bertujuan untuk perbaikan diri dari anak didik tersebut. Lembaga Pemasyarakatan Anak

(LPA) Pria Tangerang sangat mendukung program konseling. Hal tersebut terbukti dengan disediakan suatu ruang yang digunakan untuk program konseling ini, yang disebut dengan “ruang pojok curhat”. Ruangan ini selalu terbuka bagi anak didik yang memerlukan adanya pembinaan atau perhatian lebih banyak sehingga seringkali melibatkan pihak lain disamping pembina Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang. Pihak lain tersebut itu adalah psikolog yang dapat langsung berhubungan atau berhadapan dengan anak. Dalam keadaan yang demikian, anak didik seringkali mencurahkan segala keluh kesah ketika ia menjalani kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) dan ketika ia telah selesai menumpahkan segala perasaannya, anak didik menjadi lebih ceria dan semangat kembali dalam mengikuti segala aktivitas dan program-program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang.

Kegiatan lain yang merupakan program pembinaan secara individual adalah kegiatan yang disebut dengan perwalian. Dalam perwalian, disini pembina bertindak sebagai orang tua berhadapan langsung dengan anak. Menurut **Sondang Pakpahan**⁵⁴, seringkali dalam diri anak didik timbul rasa kangen sehingga mereka mendatangi pembina untuk sekedar berbagi cerita. Dalam keadaan yang demikian, biasanya anak didik menjadi seseorang yang perlu perhatian lebih, oleh karena itu dicari suatu jalan tengah yaitu pembina akan menghubungkan anak didik tersebut dengan

⁵⁴ Sondang Pakpahan (Ka Sub Bimbingan dan Perawatan), *Wawanacara*, (Tangerang : 3 September 2008).

orang tuanya. Pembinaan, khususnya yang dilakukan secara individual dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang selalu mencapai target dalam arti selalu berhasil. Hal tersebut dikarenakan terdapat sarana yang mendukung, yaitu disediakan tempat atau ruang untuk konseling dan ada pihak yang membantu untuk terlaksananya program pembinaan secara individu, yaitu dalam bentuk konseling, penyuluhan, perwalian, hingga kunjungan orang tua.

2. Kegiatan keagamaan

Kegiatan keagamaan merupakan kegiatan yang juga berorientasi pada individu. Menurut **Sondang Pakpahan**⁵⁵ unsur yang paling penting dalam pembinaan adalah agama. Tanpa bekal agama yang cukup, mustahil anak didik dapat melanjutkan hidup diluar Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA). Jadi, anak didik juga harus memiliki bekal keagamaan disamping bekal keterampilan. Di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang, kegiatan keagamaan sangatlah diutamakan. Disamping itu, untuk mendukung tercapainya kegiatan itu, Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang juga mengadakan kerjasama-kerjasama dengan lembaga-lembaga agama, misalnya kegiatan keagamaan yang bekerjasama dengan Yayasan Al-Azhar, Yabina, yang masing-masing diselenggarakan melalui kegiatan pengajian bersama, dan kegiatan positif lainnya. Selain agama Islam, kegiatan keagamaan juga diselenggarakan bagi anak didik pemeluk agama lain, seperti untuk anak

⁵⁵ Sondang Pakpahan (Ka Sub Bimbingan dan Perawatan, *Wawancara*, (Tangerang : 3 September 2008).

didik yang beragama Kristen/Katolik diselenggarakan kebaktian yang diselenggarakan oleh GKI Kwitang, Gereja Bethel Indonesia.

Pada dasarnya kegiatan keagamaan mempunyai andil yang cukup besar. Dapat dikatakan anak didik disini diposisikan sebagai orang yang sedang dalam keadaan sakit yang membutuhkan suatu tindakan. Apabila dalam keadaan sakitnya itu, diberikan siraman kerohanian maka ia akan dengan cepat sadar dan mengakui kesalahannya. Hal tersebut dapat bermanfaat bagi perkembangan diri dari anak didik itu dalam menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA).

4. Pelaksanaan Pembinaan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo

Dasar Pemikiran Pembinaan

Pembinaan anak didik di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo berdasarkan Sistem Pemasyarakatan, yang di dalam pelaksanaannya berpedoman pada 10 (sepuluh) prinsip kemasyarakatan, sebagaimana yang terutang dalam BAB IV Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02 – PK. 04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan, yaitu :

- a. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjelaskan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
- b. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan. Ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak didik

pada umumnya, baik yang berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami oleh narapidana dan anak didik hanya dibatasi kemerdekaannya untuk leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas.

- c. Berikan bimbingan (bukan penyiksaan) supaya mereka bertobat. Berikan kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya.
- d. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana. Salah satu cara diantaranya agar tidak mencampurbaurkan narapidana dengan anak didik, yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan.
- e. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan bergerak para narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Perlu ada kontrak dengan masyarakat yang terjelma dengan bentuk kunjungan hiburan ke LAPAS dan RUTAN/CABRUTAN oleh anggota-anggota masyarakat bebas dan kesempatan yang lebih banyak untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarganya.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar sebagai waktu. Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan jawatan atau kepentingan negara kecuali pada waktu tertentu saja. Pekerjaan yang terdapat di masyarakat, dan yang menunjang pembangunan, seperti meningkatkan industri kecil dan produksi pangan.

- g. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi disamping meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan agama yang dianutnya.
- h. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit yang perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak dirinya, keluarganya dan lingkungannya, kemudian dibina dan dibimbing ke jalan yang benar. Selain itu mereka harus diperlakukan sebagai manusia biasa yang memiliki harga diri agar tumbuh kembali kepribadiannya yang percaya akan kekuatan sendiri.
- i. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu.
- j. Untuk pembinaan dan bimbingan para narapidana dan anak didik, maka disediakan sarana yang diperlukan.

Pada dasarnya, kesepuluh prinsip pemasyarakatan tersebut hampir sama prinsipnya dengan asas pembinaan narapidana sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Pasal 5 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 menyebutkan bahwa sistem pembinaan, pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

a. Asas Pengayoman

Perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan adalah dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan. Selain itu juga memberikan bekal kehidupan kepada warga binaan pemasyarakatan, agar menjadi warga yang berguna di dalam pemasyarakatan.

b. Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan

Warga binaan pemasyarakatan mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama di dalam Lembaga Pemasyarakatan, tanpa membedakan.

c. Asas Pendidikan

Lembaga Pemasyarakatan memberikan warga binaan pemasyarakatan berupa pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila. Pendidikan tersebut antara lain dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan menunaikan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

d. Asas Pembimbingan

Warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan juga mendapat pembimbingan dan pembinaan yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan rohani dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

e. Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia

Warga binaan pemasyarakatan tetap diperlakukan sebagai manusia dengan menghormati harkat dan martabatnya.

f. Asas Kehilangan Kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan

Penempatan bagi terpidana di Lembaga Pemasyarakatan merupakan upaya negara guna memberi kesempatan kepada anak untuk memperbaiki perilakunya melalui pendidikan dan pembinaan yang diberikan selama di Lembaga Pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain sebagaimana layaknya manusia. Dengan kata lain, hak-hak perdatanya tetap dilindungi, seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga, atau rekreasi. Warga binaan pemasyarakatan tidak boleh diperlakukan di luar ketentuan undang-undang, seperti dianiaya, disiksa. Penderitaan satu-satunya yang dikenakan kepadanya ialah kehilangan kemerdekaan.

g. Asas Terjaminnya Hak untuk Tetap Berhubungan dengan Keluarga dan Orang-Orang Tertentu

Warga binaan pemasyarakatan harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat, serta tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Oleh karena itu, ia harus tetap dapat berhubungan dengan masyarakat yang bebas dan mempunyai kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga, seperti adanya program cuti mengunjungi keluarga.

Sasaran Pembinaan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA)

Kutoarjo

Sasaran pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo yaitu peningkatan kualitas anak didik pemasyarakatan yang pada awalnya sebagian atau seluruhnya dalam kondisi kurang. Sasaran pembinaan tersebut menurut **Paiman Saptohudoyo** adalah sebagai berikut :⁵⁶

a. Kualitas Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

Usaha peningkatan kualitas ketakwaan ini diperlukan supaya anak didik pemasyarakatan dapat diteguhkan imannya terutama memberikan pengertian supaya anak didik pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah.

b. Kualitas Intelektual

Usaha peningkatan kualitas intelektual ini diperlukan supaya pengetahuan serta kemampuan berpikir anak didik pemasyarakatan semakin meningkat, sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan.

c. Kualitas Kesadaran Hukum

Usaha peningkatan kualitas kesadaran hukum dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi, sehingga sebagai anggota masyarakat, anak didik pemasyarakatan dapat menyadari hak dan kewajibannya dalam

⁵⁶ Paiman Saptohudoyo (Ka Sub Sie Bimkeswat), *Wawancara*, (Kutoarjo : 14 Agustus 2008)

rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat kepada hukum.

d. **Kualitas Profesionalisme/ Keterampilan**

Usaha peningkatan kualitas profesionalisme/ keterampilan diperlukan supaya anak didik masyarakat dapat mengembangkan bakat dan potensi yang dimilikinya, sehingga nantinya berguna bagi masa depan anak didik masyarakat setelah keluar dari Lembaga Masyarakat Anak.

e. **Kualitas Kesehatan Jasmani dan Rohani**

Usaha peningkatan kualitas kesehatan jasmani dan rohani diperlukan supaya anak didik masyarakat dapat tetap menjaga keseimbangan jasmani dan rohaninya meskipun ia berada di dalam Lembaga Masyarakat Anak, sehingga dapat mengikuti kegiatan-kegiatan selama masa pembinaan dengan baik.

Pelaksanaan Pembinaan Anak di Lembaga Masyarakat Anak (LPA) Kutoarjo

Pembinaan secara umum

Sebagaimana diketahui bahwa sistem masyarakat yang berlaku dewasa ini, secara konseptual dan historis sangatlah berbeda dengan yang berlaku dalam sistem kepenjaraan. Asas yang dianut dalam sistem

pemasyarakatan dewasa ini menempatkan tahanan, narapidana, anak didik dan klien pemasyarakatan sebagai subjek dan dipandang sebagai pribadi dan warga negara biasa serta dihadapi bukan dengan latar belakang pembalasan tetapi dengan pembinaan dan bimbingan. Perbedaan kedua sistem tersebut memberikan implikasi pada perbedaan dalam cara-cara pembinaan dan bimbingan yang dilakukan, disebabkan perbedaan tujuan yang ingin dicapai.

Secara umum, pembinaan dan bimbingan pemasyarakatan harus ditingkatkan melalui pendekatan pembinaan mental (agama dan Pancasila) meliputi pemulihan harga diri sebagai pribadi maupun sebagai warga negara yang meyakini dirinya masih memiliki potensi produktif bagi pembangunan bangsa dan oleh karena itu mereka dididik dan dilatih juga untuk menguasai keterampilan tertentu guna dapat hidup mandiri dan berguna bagi pembangunan. Ini berarti, bahwa pembinaan dan bimbingan yang diberikan mencakup bidang mental dan ketrampilan

Bekal mental dan keterampilan yang dimiliki, diharapkan dapat mempunyai hasil sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam masyarakat. Semua usaha ini dilakukan dengan berencana dan sistematis agar selama mereka dalam pembinaan dapat bertobat menyadari kesalahannya dan bertekad untuk menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, negara dan bangsa.

Disadari bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan bimbingan melalui berbagai bentuk dan usaha, tentunya menuntut kemampuan dan tanggung jawab yang lebih berat dari para pelaksananya termasuk perlunya

dukungan berupa sarana dan fasilitas selalu serba terbatas, maka para petugas juga harus mampu memanfaatkan melalui pengelolaan yang efisien sehingga dapat mencapai hasil yang optimal.

Pembinaan anak didik pemsyarakatan yang dilaksanakan di Lembaga Pemsyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo, baik pembinaan di dalam Lembaga Pemsyarakatan Anak (LPA) maupun pembinaan diluar Lembaga Pemsyarakatan Anak (LPA), dilaksanakan oleh :⁵⁷

- a. Lembaga Pemsyarakatan Anak (LPA) sebagai unit pelaksana teknis pemsyarakatan yang menampung, merawat dan membina anak didik pemsyarakatan.
- b. Balai Pemsyarakatan sebagai unit pelaksana teknis pemsyarakatan yang menangani pembinaan klien pemsyarakatan yang terdiri dari terpidana bersyarat (dewasa dan anak), narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, serta anak didik pemsyarakatan, yaitu anak pidana dan anak negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau diserahkan kepada keluarga asuh, anak didik pemsyarakatan yang mendapat cuti menjelag bebas serta anak didik pemsyarakatan yang oleh hakim diputus dikembalikan kepada orang tuanya.
- c. Pembina terdiri dari :
 - Pegawai pemsyarkatan yang melakukan pembinaan secara langsung terhadap anak didik pemsyarakatan.

⁵⁷ Paiman Saptohudoyo (Ka Sub Sie Bimkeswat), *Wawancara*, (Kutoarjo : 14 Agustus 2008)

- Mereka yang terdiri dari perorangan, kelompok atau organisasi yang secara langsung maupun tidak langsung ikut melakukan atau mendukung pembinaan anak didik pemasyarakatan.
 - Pembimbing, yaitu petugas Balai Pemasyarakatan di luar Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA).
- d. Tim Pengamat Pemasyarakatan, yaitu tim yang bertugas memberi pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka tugas pengamatan terhadap pelaksanaan pembinaan anak didik dan klien pemasyarakatan.

Di dalam melaksanakan program-program pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo melakukan upaya koordinasi dengan instansi terkait. Menurut **Paiman Saptohudoyo**⁵⁸, program-program pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan yang telah dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan Belajar berupa Kelompok Belajar (Kejar)

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensukseskan Program Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun, Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar (UPTD-SKB) Kabupaten Purworejo menyelenggarakan program kelompok belajar Paket A, Paket B, dan Paket C.

Pelaksanaan Kejar Paket A setara Sekolah Dasar (SD) belum dapat dilaksanakan karena jumlah siswa yang tidak memenuhi persyaratan.

⁵⁸ Paiman Saptohudoyo (Ka Sub Sie Bimkeswat), *Wawancara*, (Kutoarjo : 14 Agsutus 2008).

Untuk pelaksanaan Kejar Paket B setara Sekolah Menengah Pertama (SMP) sudah dilaksanakan dengan tenaga pengajar baik dari pihak Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) maupun dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo. Untuk pelaksanaan Kejar Paket C setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) sudah dilaksanakan, bahkan sampai meluluskan siswanya.

b. Pendidikan Agama

Guna peningkatan mental keagamaan dan spiritual anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo bekerja sama dengan Departemen Agama Kabupaten Purworejo melalui Kantor Urusan Agama (KUA) Kutoarjo memberikan bantuan tenaga Imam dan Khotib setiap Jumat dengan mengadakan Sholat Jumat berjamaah di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo. Selain itu, tenaga Imam dan Khotib juga ada yang berasal dari pegawai Lembaga Pemasyarkatan Anak (LPA) Kutoarjo.

Selain kegiatan keagamaan, pendidikan keagamaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo juga ada yang sifatnya insidensial, berupa:

- Peringatan hari-hari besar keagamaan.
- Melaksanakan Sholat Tarawih di Bulan Ramadhan dan Sholat Idul Fitri
- Melaksanakan Sholat Idul Adha dan melaksanakan kurban pada waktu Idul Adha.

c. Pendidikan Keterampilan

Dalam usaha pemberian keterampilan bagi anak didik masyarakat, Lembaga Masyarakat Anak (LPA) Kutoarjo bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja melalui Balai Latihan Kerja (BLK) Purworejo dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar (UPTD-SKB).

Bentuk keterampilan yang dilaksanakan di Lembaga Masyarakat Anak (LPA) Kutoarjo, berupa :

- Pendidikan keterampilan pertukangan, sangkar burung;
- Pendidikan keterampilan pertanian;
- Pendidikan keterampilan peternakan ayam;
- Pendidikan keterampilan menjahit;
- Pendidikan keterampilan perbengkelan las;
- Pendidikan keterampilan wikel (gulung dinamo);
- Pendidikan keterampilan budidaya jamur tiram;
- Pendidikan keterampilan pembuatan batako dan paving blok.

d. Pendidikan Kepramukaan dan Kewarganegaraan

Pendidikan ini untuk menanamkan sikap nasionalisme, kebangsaan, kerja sama, dan gotong royong di Lembaga Masyarakat Anak (LPA) Kutoarjo, juga dilaksanakan pendidikan kepramukaan dan kewarganegaraan yang bersifat insidental, yaitu dengan ikut serta di dalam acara peringatan Hari Pramuka setiap tanggal 14 Agustus tiap tahunnya dan ikut mensukseskan Kirab Tunas Kelapa. Selain itu, setiap tanggal 17

Agustus, beberapa anak didik pemasyarakatan juga mengikuti upacara bendera dengan memakai seragam pramuka.

e. Pendidikan Olahraga dan Rekreasi

Kesehatan jasmani dan rohani anak didik pemasyarakatan diselenggarakan secara rutin setiap hari Jumat sehingga dicanangkan sebagai Hari Kesehatan dan Rekreasi.

Kegiatan olahraga dan rekreasi yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo :

- Bola voli
- Tennis meja
- Catur
- Sepak takraw
- Musik (gitar dan organ tunggal)
- Menonton televisi

f. Perpustakaan

Perpustakaan terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo dan dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh semua anak didik pemasyarakatan, sehingga dapat meningkatkan minat baca dari anak didik pemasyarakatan. Pelayanan perpustakaan dijadwalkan setiap Hari Rabu dan Hari Sabtu.

g. Pelayanan Kesehatan dan Makanan

- Pelayanan Kesehatan

Di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo terdapat sebuah ruangan kesehatan yang bertujuan untuk menolong dan mengobati anak didik pemasyarakatan yang membutuhkan pengobatan atau sakit. Dalam hal pengadaan obat-obatan, Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo bekerja sama dengan instansi kesehatan Kabupaten Purworejo, permintaan atau pengadaan obat-obatan serta rujukan bagi anak didik pemasyarakatan diteruskan pada Puskesmas Kutoarjo.

Bagi anak didik pemasyarakatan yang sedang sakit dan memerlukan perawatan inap, Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Purworejo, sehingga bagi anak didik pemasyarakatan tidak dipungut biaya pengobatan.

- Pelayanan Makanan

Pelayanan makanan bagi anak didik pemasyarakatan adalah secara rutin 3 (tiga) kali sehari sesuai dengan jadwal dan menu serta porsi makanan yang cukup kondisi yang baik. Selain itu, adapula makanan tambahan supaya kesehatan anak didik pemasyarakatan tetap terjamin.

h. Terciptanya Harmonisasi Hubungan Anak Didik Pemasyarakatan dengan Keluarga dan Badan Sosial

Harmonisasi hubungan antara anak didik pemasyarakatan dengan keluarganya dilaksanakan melalui hari kunjungan. Adapun hari kunjungan itu adalah Hari Senin dan Hari Kamis dimulai pukul 08.00-13.00 WIB. Selain itu juga ada kunjungan badan-badan sosial, antara lain

Badan Sosial Keagamaan, Lembaga Sosial Masyarakat, Perguruan Tinggi, Instansi Kesehatan.

Pembinaan yang dilaksanakan kepada anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan menimbulkan hak dan kewajiban bagi anak didik pemasyarakatan. Mengenai hak dan kewajiban anak didik pemasyarakatan, menurut **Paiman Saptohudoyo** adalah sebagai berikut :⁵⁹

Hak

- a. mendapatkan tempat dan alat untuk tidur yang memenuhi syarat-syarat kesehatan;
- b. mendapatkan makan dan minum serta perlengkapannya;
- c. mendapatkan pakaian dengan warna dan potongan yang telah ditentukan;
- d. mendapatkan perlakuan secara manusiawi;
- e. mendapatkan keamanan dan ketentraman;
- f. mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan oleh para medis atau dokter;
- g. mendapatkan pendidikan, bimbingan umum, dan bimbingan kerohanian;
- h. beribadah menurut agama dan kepercayaan;
- i. kunjungan keluarga, handai taulan dan penasihat hukum selama tidak mengganggu ketertiban dan atas izin pejabat yang berwenang;
- j. menerima dan mengirim surat, uang atau barang berdasarkan ketentuan yang berlaku;

⁵⁹ Paiman Saptohudoyo (Ka Sub Sie Bimkeswat), *Wawancara*, (Kutoarjo : 14 Agustus 2008).

- k. membelanjakan uang titipan, simpanan miliknya dalam batas-batas kewajaran, untuk kepentingan dirinya sendiri berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- l. menyampaikan permasalahan, baik yang bersifat gangguan secara fisik atau mental secara pribadi.

Kewajiban

- a. mentaati dan mematuhi peraturan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo;
- b. menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban;
- c. mengikuti petunjuk dan melaksanakan perintah petugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. melaporkan dan memberitahukan keadaan akan hal-hal yang dapat berakibat terganggunya keamanan, ketertiban, dan ketentraman para petugas;
- e. menyerahkan, menitipkan uang serta barang lain yang dilarang untuk dibawa kepada petugas;
- f. menjaga dan memelihara tanaman dan kebersihan lingkungan;
- g. menjaga dan memelihara alat-alat perlengkapan yang telah diberikan untuk dirinya agar tetap utuh, bersih, dan rapi;
- h. mengikuti senam pagi, apel pagi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;

- i. mengikuti program kegiatan pendidikan, bimbingan yang bersifat umum dan khusus yang diberikan kepada dirinya;
- j. melaksanakan pekerjaan yang diberikan, diperintahkan oleh petugas atau pejabat yang berwenang;
- k. melaksanakan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing dalam waktu dan tempat yang telah ditentukan;
- l. menjalin tata karma dan kesopanan terhadap sesama anak didik pemsyarakatan berdasarkan kekeluargaan;
- m. menyerahkan kembali alat-alat perlengkapan yang pernah dikuasainya pada saat pindah lepas dan meninggalkan Lembaga Pemsyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo.

Pembinaan secara individual atau perorangan

Pembinaan secara individual merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan khususnya dalam menghadapi tingkah laku anak didik pemsyarakatan. Hal tersebut dikarenakan banyak anak didik pemsyarakatan yang berbeda-beda kelakuan sehingga membutuhkan perlakuan dalam bentuk pembinaan yang berbeda pula. Salah satu bentuk pembinaan ini adalah pembinaan yang harus dilakukan secara perorangan.

Lembaga Pemsyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo telah lama melakukan pembinaan secara perorangan. Pembinaan ini dilakukan dengan hanya melibatkan masing-masing anak didik pemsyarakatan dengan para pembina Lembaga Pemsyarakatan Anak (LPA). Bentuk pembinaan secara

perorangan ini dirasa sangat perlu khususnya untuk menumbuhkan semangat dari anak didik pemasyarakatan sehingga dapat menjalankan kehidupannya yang baru di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA).

Pembinaan secara individual yang ditujukan bagi anak didik pemasyarakatan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarkatan Anak (LPA) Kutoarjo adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan Keagamaan

Kegiatan keagamaan, seperti sholat berjamaah merupakan kegiatan rutin yang harus dilakukan oleh anak didik pemasyarakatan. Selain sholat berjamaah dan ibadah lain menurut agama dan kepercayaan masing-masing, ada kegiatan yang dilakukan secara insidentil, yaitu pembimbingan agama. Pembimbingan agama ini sangat perlu dilakukan khususnya terhadap masing-masing anak didik pemasyarakatan. Dalam pembimbingan keagamaan ini biasanya dilakukan secara individu, yaitu dalam bentuk ceramah kecil ataupun melibatkan masing-masing anak didik, yaitu dalam bentuk pengajian bersama.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo belum ada sarana untuk tempat pembinaan kegamaan yang semestinya, karena tempat untuk melakukan kegiatan keagamaan ini biasanya dilakukan di ruang aula sebagai ruang terbesar di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo ini.

2. Bimbingan Psikologi

Bimbingan psikologi juga merupakan pembinaan yang ditujukan secara individual. Di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo tidak jarang menerima kunjungan dari psikolog-psikolog maupun dari para mahasiswa Fakultas Psikolog untuk memberikan bimbingan guna menguatkan hati para anak didik sehingga dapat menjalani kehidupannya di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA). Selain itu, bimbingan psikologi juga dilakukan oleh pembina Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA).

Bentuk dukungan dilakukan dengan cara memberikan dorongan dan menguatkan hati para anak didik. Menurut **Paiman Saptohudoyo**⁶⁰ dahulu kegiatan ini kurang mengena mungkin dikarenakan tingkah laku dari para anak didik pada masa itu yang kurang mau menerima masuknya lingkungan dari luar. Tetapi pada masa sekarang ini, dapat berlangsung dengan baik.

Kegiatan yang dilakukan misalnya setiap bulan sekali ada anak yang selesai menjalani hukumannya. Sebelum anak tersebut pulang kerumah maka, anak tersebut diberikan pembinaan dulu secara khusus, dibekali agar ia dapat mempersiapkan diri sebelum keluar ke Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) dan kembali ke masyarakat.

Ada lagi suatu keadaan yang sering dijumpai yaitu rasa gelisah pada setiap anak di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA).

⁶⁰ Paiman Saptohudoyo (Ka Sub Sie Bimkeswat), *Wawancara*, (Kutoarjo, 14 Agustus 2008)

Keadaan ini sering ditemui karena mereka sering merasa kangen pada keluarga. Terlebih lagi kebanyakan, keluarga mereka bertempat tinggal jauh dan keadaan mereka yang cenderung tidak mampu. Rasa kangen ini biasanya diatasi dengan mendatangi orang tua dari anak didik tersebut ke Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA), yang biayanya biasanya ditanggung dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bekerjasama dengan Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA).

Dalam pembinaan secara individual yang dilakukan dengan pembina, sangat dilakukan dengan suasana kekeluargaan. Hal tersebut dapat tercermin dari hubungan yang terjalin antara pembina dengan anak didik selayaknya orang tua dengan anaknya sendiri. Pembina memberikan motivasi kepada anak didik dan menempatkan diri sebagai orang tua dari anak didik karena keadaan anak didik yang jauh dari orang tua dan tidak adanya kemampuan untuk bertemu dengan orang tua. Jadi, dengan terjalinnya hubungan itu maka timbul suatu kewajiban yaitu anak didik patuh terhadap pembina.

Pada dasarnya dari penelitian dan pengamatan yang penulis lakukan dapat dikatakan bahwa berhasil atau tidak berhasilnya pembinaan yang ditujukan kepada anak didik sangat tergantung dari kemauan anak didik untuk melakukannya, di samping itu juga diperlukan adanya tanggung jawab dari pembina yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) untuk membina anak didik agar tercapai tujuan pembinaan. Berdasarkan penelitian

yang dilakukan oleh penulis, data yang didapat berasal dari sampel sebanyak 50 (lima puluh) orang dari anak didik yang terdapat dalam masing-masing Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA). Dengan demikian, diharapkan dapat menemukan hasil yang memadai mengenai pelaksanaan pembinaan anak secara individual.

Kegiatan pembinaan yang ditujukan kepada anak didik adalah lebih kepada perbaikan sifat dan tingkah laku dari anak didik tersebut. Oleh karena itu, perlu dicari bentuk dari pembinaan yang ditujukan kepada anak didik terutama program pembinaan yang dapat dengan cepat memberikan perubahan atau nilai yang positif dari anak didik.

Anak didik harus dilibatkan dalam pelaksanaan pembinaan. Hal tersebut harus dilakukan oleh pembina Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) agar dapat tercapai tujuan pembinaan anak, yaitu untuk mengubah sifat dan sikap anak menjadi lebih baik serta membina anak didik dengan memberikan keahlian atau ilmu sebagai bekal mereka nantinya.

Bentuk tanggapan dari anak didik terhadap pelaksanaan pembinaan yang diberikan kepada mereka akan penulis sajikan dalam bentuk tabel seperti di bawah ini :

Tabel 6

Tanggapan Anak Didik Terhadap Pelaksanaan Pembinaan

No	Anak Didik Pemasyarakatan	Asal LPA		%	
		LPA Tangerang	LPA Kutoarjo		
1.	Merasa dibina	28	40	56%	80%
2.	Tidak merasa dibina	22	10	44%	20%
JUMLAH		50	50	100%	100%

Sumber : data primer, 2008.

Anak didik yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang merasa dibina. Mereka merasa senang dan dilibatkan dalam program pembinaan selama ini. Misalnya mereka mendapatkan manfaat dari program pembinaan, seperti keahlian, ilmu karena sekolah, kegiatan ibadah, dan sebagainya. Sebanyak 40 (empat puluh) orang anak didik yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo juga merasa dibina dengan alasan yang sama, yaitu mendapat manfaatnya serta merasa nyaman karena dengan mengikuti pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) berarti mereka tidak merasa bosan karena banyak kegiatan yang harus dilakukan.

Sebaliknya, sebanyak 22 (dua puluh dua) orang anak didik di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang merasa tidak dibina karena mereka merasa didiamkan saja oleh pembina. Mereka seperti tidak dianggap anak didik yang harus mendapat pembinaan dan bimbingan, sebaliknya mereka seperti anak

didik yang sering disuruh oleh pembina, seperti membersihkan pekarangan, dan sebagainya. Anak didik di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo yang tidak merasa dibina adalah sebanyak 10 (sepuluh) orang. Mereka rata-rata orang yang sudah berusia hampir dewasa. Hal ini dikarenakan mereka lebih dituakan sehingga tidak jarang pembina lebih suka menyuruh mereka untuk menjaga anak didik lain yang lebih muda. Jadi mereka jarang atau tidak terlibat dalam program pembinaan. Menurut anak didik tersebut, walaupun tidak merasa dibina, tetapi mereka tetap senang, karena menurut mereka keadaan mereka yang diterima di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo lebih baik daripada keadaan Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo dahulu.

Pembinaan yang berorientasi pada individual anak didik penting dilakukan dengan alasan untuk kepentingan anak didik semata. Bentuk pembinaan anak yang dilakukan secara individual dapat digambarkan dalam bentuk tabel berikut ini :

Tabel 7

Bentuk Pembinaan Secara Individual Terhadap Anak Didik

No	Anak Didik Pemasyarakatan	Asal LPA		%	
		LPA Tangerang	LPA Kutoarjo		
1.	Konseling	28	20	56%	40%
2.	Keagamaan	17	12	34%	24%
3.	Tidak ada	5	18	10%	36%
JUMLAH		50	50	100%	100%

Sumber : data primer, 2008.

Pembinaan secara individual yang lebih disukai oleh anak didik adalah pembinaan dalam bentuk konseling. Hal tersebut terbukti dari penelitian yang dilakukan menghasilkan 28 (dua puluh delapan) anak didik dari Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang dan 20 (dua puluh) anak didik dari Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo mengikuti kegiatan konseling yang diadakan. Konseling menurut mereka sangat bermanfaat. Mereka menjadi lebih tenang dan mereka menjadi lebih bersemangat untuk merubah perilaku mereka menjadi lebih baik. Disamping itu, pihak yang membantu konseling, baik pembina maupun psikolog dapat sedikit membantu untuk meringankan beban mereka.

Kegiatan keagamaan juga merupakan salah satu faktor pendukung perubahan sikap dan pengendalian diri dari anak didik. Hal tersebut berdasarkan hasil dari penelitian, yaitu sebanyak 17 (tujuh belas) anak didik dari Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang dan 12 (dua belas) anak didik dari Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo telah merasakan manfaatnya. Kebanyakan dari mereka mengungkapkan bahwa dengan beribadah dan mengikuti kegiatan keagamaan lainnya telah memberikan perubahan sikap, yaitu mereka lebih sabar, lebih rajin beribadah, dan dekat kepada Allah. Sisanya, sebanyak 5 (lima) anak didik dari Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang dan 18 (delapan belas) anak didik dari Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo mengatakan tidak ada karena mereka lebih memilih untuk mengikuti program lainnya. Menurut mereka, konseling bukanlah kegiatan wajib dan kegiatan keagamaan yang wajib adalah hanya sholat berjamaah saja.

Adanya kegiatan pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) mengharuskan anak didik untuk secara langsung ikut melaksanakan kegiatan tersebut. Pembina sebagai pelaksana mewajibkan kepada setiap anak didik untuk ikut serta. Pelaksanaan pembinaan itu adalah sebagai wujud kasih sayang dan kepedulian dari pembina agar anak didik dapat merasa nyaman dan tidak terkekang khususnya selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA).

Bentuk partisipasi anak didik, baik di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo maupun di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang dalam menjalankan kegiatan pembinaan secara individual digambarkan dalam bentuk tabel berikut ini :

Tabel 8
Partisipasi Anak Didik dalam Pembinaan Secara Individual

No	Anak Didik Pemasyarakatan	Asal LPA		%	
		LPA Tangerang	LPA Kutoarjo		
1.	Aktif	40	38	80%	76%
2.	Kadang-kadang	10	12	20%	24%
3.	Tidak Aktif	-	-	-	-
JUMLAH		50	50	100%	100%

Sumber : data primer, 2008.

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh hasil bahwa terdapat kemauan dari anak didik untuk mengikuti pembinaan secara individual. Sebanyak 40 (empat puluh) anak didik dari Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang dan 38 (tiga puluh delapan) anak didik dari Lembaga Pemasyarakatan Anak

(LPA) Kutoarjo aktif mengikuti pembinaan secara individual. Keikutsertaan mereka lebih didasari atas rasa sukarela dan tanpa paksaan terutama dari pembina Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA).

Sikap lain yang ditunjukkan oleh anak didik, yaitu sebanyak 10 (sepuluh) anak didik dari Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang dan 12 (dua belas) anak didik dari Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo mengaku kadang-kadang mengikuti pembinaan individual tersebut. Hal tersebut dikarenakan mereka lebih memilih untuk melakukan aktivitas lainnya yang lebih disukai mereka, seperti main band bersama.

Kegiatan pembinaan yang ditujukan kepada anak didik adalah lebih kepada perbaikan sifat dan tingkah laku dari anak didik tersebut. Oleh karena itu, perlu dicari beberapa bentuk dari pembinaan yang ditujukan kepada anak didik terutama pembinaan yang dapat dengan cepat memberikan perubahan atau nilai yang positif dari anak didik.

Pelaksanaan pembinaan juga sangat membutuhkan hal-hal lain diluar kemauan dari anak didik itu sendiri. Hal-hal lain itu misalnya didukungnya kegiatan pembinaan ini oleh pihak-pihak seperti pembina, psikolog juga tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Tanpa itu semua, maka pembinaan yang dilakukan akan kurang bermanfaat tentunya bagi perbaikan perilaku anak.

Tersedianya fasilitas yang mendukung jalannya pembinaan dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 9

Fasilitas untuk Anak Didik dalam Rangka Pembinaan Secara Individual

No	Anak Didik Pemasyarakatan	Asal LPA		%	
		LPA Tangerang	LPA Kutoarjo		
1.	Ada	50	30	100%	60%
2.	Tidak ada	-	20	-	40%
JUMLAH		50	50	100%	100%

Sumber : data primer, 2008.

Fasilitas yang dimaksud adalah adanya ruangan yang khusus digunakan dalam menjalani kegiatan pembinaan, adanya sarana lainnya seperti tenaga pembina maupun dari pihak lain. Fasilitas tersebut adalah sel tempat tinggal anak didik, ruang aula, ruang audit, ruang pembinaan, ruang sel disiplin, ruang kunjungan, klinik.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil sebanyak 50 (lima puluh) anak dari Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang dan 30 (tiga puluh) anak didik dari Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo mengatakan terdapat fasilitas yang mendukung. Keadaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang sangat berbeda dengan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo. Sebagai Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) yang terbesar di Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang memiliki ruangan yang memang diperuntukkan khusus untuk pembinaan secara individual, misalnya disediakan ruang pojok curhat yang dapat digunakan oleh anak didik untuk menumpahkan keluh kesahnya selama menjalani pembinaan di

Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA), sedangkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo belum mempunyai ruangan khusus seperti itu.

Ada satu hal lagi yang sangat penting yang mendukung jalannya pembinaan agar pembinaan yang berorientasi secara individual itu dapat berhasil. Hal tersebut adalah dukungan secara langsung dari pihak keluarga, dalam hal ini adalah keluarga dari anak didik. Keluarga juga harus dilibatkan dalam pembinaan terhadap anak didik karena bagaimanapun juga anak didik adalah anak biasa yang sama dengan anak lainnya di luar Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA). Mereka masih mempunyai rasa kangen dan butuh perhatian lebih dari keluarganya.

Bentuk dukungan keluarga terhadap anak didik dalam melakukan pembinaan secara individual digambarkan dalam tabel seperti berikut ini :

Tabel 10
Dukungan Keluarga Terhadap Anak Didik di LPA

No	Anak Didik Pemasyarakatan	Asal LPA		%	
		LPA Tangerang	LPA Kutoarjo		
1.	Ada interaksi	40	27	80%	54%
2.	Tidak ada interaksi	10	23	20%	46%
JUMLAH		50	50	100%	100%

Sumber : data primer, 2008.

Keluarga merupakan faktor yang terpenting yang ikut berperan dalam keberhasilan pembinaan ini. Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis,

sebanyak 40 (empat puluh) anak didik dari Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang dan 27 (dua puluh tujuh) anak didik dari Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo mengatakan terdapat interaksi hubungan dengan keluarganya. Hal tersebut berarti seringkali keluarga menjenguk atau dilibatkan dalam program pembinaan terhadap anak. Di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang misalnya, telah lama diadakan kegiatan perwalian yang ternyata sangat bermanfaat bagi anak didik. Jadi pembina akan menghubungkan anak didik dengan orang tuanya sehingga orang tua dapat mengikuti perkembangan anaknya selama berada di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA).

Sebanyak 10 (sepuluh) anak didik dari Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang dan 23 (dua puluh tiga) anak didik dari Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo mengatakan bahwa tidak ada interaksi dengan keluarga. Hal tersebut mungkin karena keluarga bertempat tinggal jauh dan tidak memiliki cukup uang untuk sekedar mengunjungi anaknya di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA).

Pembinaan kepada anak yang didasari pada pembinaan secara individual, baik yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo dan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang menurut penulis mempunyai program yang sama, yaitu kedua Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) sama-sama mengedepankan program pembinaan keagamaan dan konseling.

Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) menyadari kedudukannya sebagai tempat pembinaan anak didik. Oleh karena itu, baik Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo maupun Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang berusaha melaksanakan program pembinaan secara individual dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa anak didik mau berperan dalam pembinaan konseling dan keagamaan, walaupun dari masing-masing Lembaga Pemasyarakatan (LPA), program konseling lebih diminati oleh anak didik.

Menurut penulis, dengan mengikuti program konseling, anak didik dapat mencurahkan segala perasaannya selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LPA), baik dengan pembina maupun dengan pihak lain, dalam hal ini psikolog sehingga tercipta rasa nyaman di dalam diri anak didik. Selain itu, dari pengamatan penulis selama penelitian, interaksi yang dilakukan antara pembina dan anak didik adalah lebih kepada interaksi antara orang tua dengan anaknya walaupun dalam beberapa keadaan yang lain, pembina menjadi orang yang sangat tegas dan menjadi ditakuti oleh anak didik. Kondisi yang ada adalah kebanyakan anak didik yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) merupakan anak-anak yang kurang mampu sehingga frekuensi bertemu dengan orang tuanya juga tidak terus-menerus. Terlebih lagi jarak antara tempat tinggal orang tua dengan Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) sangat jauh, kondisi ini banyak dijumpai di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo.

Program pembinaan keagamaan juga diikuti oleh anak didik bahkan program keagamaan merupakan program yang wajib diikuti. Menurut penulis, dengan mengikuti program keagamaan maka kondisi anak didik akan berubah, dari yang sebelumnya merupakan anak yang nakal menjadi anak yang lebih sabar dan penurut. Disamping itu, menurut penulis, dengan memiliki bekal agama yang cukup maka anak didik dapat memiliki kehidupan dan pergaulan yang lebih baik.

Satu-satunya yang menjadi permasalahan menurut penulis adalah kurangnya fasilitas yang mendukung jalannya program konseling dan keagamaan tersebut. Di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo, fasilitas yang ada dapat dikatakan minim, mengingat kondisi Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) yang kecil, di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo belum ada sarana seperti tempat untuk konseling maupun musholla sebagaimana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang.

Pembinaan anak secara individual yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang dan Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo, menurut penulis secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik terlebih lagi bila didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Hal tersebut dapat dilihat dari data-data yang telah penulis sajikan dalam bentuk tabel sebelumnya.

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan selama mengadakan penelitian di kedua Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA), baik Lembaga

Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang dan Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo menempatkan kegiatan keagamaan sebagai program yang sangat berorientasi pada individu anak didik. Pendapat tersebut didasarkan pada bukti bahwa masing-masing Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) telah memprogram kegiatan pembinaan keagamaan dalam waktu yang sesering mungkin.

Penempatan kegiatan keagamaan dengan tujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah hal utama yang harus dipupuk oleh anak didik sehingga mereka dapat menjalani kehidupannya di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) dengan baik maupun sebagai bekal untuk kehidupan di luar Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA).

Penempatan kegiatan keagamaan sebagai program yang utama dari pembinaan secara individual sangat diperhatikan oleh pembina Lembaga Pemasyarakatan (LPA). Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan, di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo tidak terlihat pembina memberikan penilaian hanya saja tetap dilakukan pengawasan yang ketat sehingga anak didik mau tidak mau harus mengikuti kegiatan keagamaan, khususnya sholat berjamaah. Keadaan lain terlihat di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang. Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan, selain sholat berjamaah yang harus dilaksanakan dengan rutin, ternyata ada catatan atau absensi yang bertujuan agar pembina dapat melihat kemajuan dari anak didik akan peningkatan kesadaran mereka

terhadap keyakinan beragama. Hal tersebut juga berlaku bagi mereka yang beragama selain Islam.

Penulis juga menemukan hal lain, yaitu dengan dilakukannya pengawasan yang ketat terhadap kegiatan keagamaan ini maka apabila anak didik tidak melaksanakan kegiatan keagamaan ini dengan baik akan menerima sanksi. Berdasarkan wawancara penulis dengan anak didik di kedua Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA), sanksi yang diberikan ada sanksi ringan dan sanksi berat. Sanksi ringan diberikan apabila mereka terlambat bangun dua atau tiga kali, kurang rapi membereskan tempat tidur. Sedangkan sanksi berat diberikan kepada anak didik apabila mereka tidak melaksanakan sholat berjamaah dengan sungguh-sungguh setelah mendapat teguran dari pembina dua atau tiga kali. Adapun bentuk dari sanksi ringan adalah membersihkan halaman Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA), dijemur, lari keliling lapangan, atau dilarang menonton televisi, sedangkan sanksi berat dapat berupa dimasukkan ke dalam sel pengasingan selama beberapa hari, tidak boleh berhubungan dengan anak didik yang lain dan tidak boleh menerima kunjungan dari siapapun termasuk keluarganya. Jadi begitu pentingnya kegiatan pembinaan keagamaan sehingga apabila terjadi pelanggaran oleh anak didik, misalnya tidak mengikuti sholat berjamaah maka akan dikenakan sanksi yang berat.

Berdasarkan wawancara penulis dengan pembina di kedua Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA), masing-masing pembina mengatakan hukuman atau sanksi, baik yang ringan maupun yang berat memang harus dikenakan

kepada anak didik yang melanggar peraturan. Terlebih sebagai anak didik, mereka perlu ditingkatkan rasa kedisiplinannya mengingat masing-masing dari mereka memiliki perilaku yang kurang baik dan menyimpang.

Keadaan yang lain ditemukan oleh penulis ketika melakukan wawancara dengan anak didik, dari masing-masing Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA). Menurut anak didik tersebut, mereka mengalami ketakutan terhadap pembina, terutama kepada pembina yang tegas. Di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo, pembinaan yang diamati oleh penulis lebih bersifat kekeluargaan. Keadaan lain terlihat di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang, dari wawancara yang penulis lakukan terutama dengan anak didik yang telah mengalami sanksi hukuman berat, rata-rata dari mereka mengatakan sangat tersiksa dengan hukuman yang dijalani. Anak didik dimasukkan dalam sel pengasingan yang lampunya sering dimatikan dengan sengaja oleh pembina dimana hukuman ini harus dilaksanakan selama enam hari. Akibat dari keadaan ini sangat membekas kepada diri anak didik tersebut sehingga timbul rasa kurang suka terutama kepada pembina yang dianggap sebagai orang yang jahat dan tidak menyenangkan. Mereka mengatakan tidak ingin menjalani hukuman yang seperti itu lagi. Anak didik yang pernah dijatuhi sanksi, baik ringan atau berat kadang-kadang merasa hubungannya dengan pembina menjadi renggang.

Keadaan yang demikian menurut penulis sebenarnya dapat mengakibatkan pembinaan secara individual tidak dapat berjalan dengan baik. Bagaimana pembinaan secara individual itu dapat berhasil jika

hubungan antara pembina dengan yang dibina tidak baik. Hal tersebut membutuhkan adanya rasa tanggung jawab dan keikhlasan dari kedua belah pihak. Memang menjadi seorang pembina bukanlah merupakan tugas yang mudah, mereka harus siap dan berusaha untuk mengubah sikap anak didik dari yang kurang baik menjadi patuh dan disiplin sehingga kadangkala harus diterapkan sanksi apabila anak didik tidak mematuhi atau melanggar peraturan. Belum lagi jumlah anak didik di masing-masing Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) tersebut sangat banyak dan pembina yang ada kurang dapat menangani semua anak didik tersebut secara lebih dekat.

Apabila semua hal tersebut dijalani, maka interaksi yang terjadi antara pembina dan anak didik dapat berjalan dengan baik. Dengan kata lain, anak didik menjadi patuh kepada pembina, anak didik berperan serta dalam program pembinaan, anak didik menunjukkan kemauan untuk berubah menjadi lebih baik. Semua itu dapat terlaksana karena adanya dukungan dari para pihak sehingga anak didik dapat memperbaiki sikap dan perilakunya sebelum ia kembali ke dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian berupa hasil penelitian yang penulis lakukan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang dan Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo, dapat dikemukakan oleh penulis bahwa metode pembinaan anak secara perorangan atau *individual treatment model* telah dikenal di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA), baik di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang maupun di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan

adanya pembinaan yang khusus demi kepentingan perorangan anak didik, yaitu pembinaan keagamaan, dan konseling.

Menurut penulis, walaupun metode pembinaan anak secara perorangan itu telah dikenal akan tetapi pelaksanaannya masih belum sesuai dengan tujuan dari metode pembinaan anak secara perorangan itu sendiri. Metode pembinaan anak secara perorangan bertujuan untuk kesejahteraan anak. Jadi kepentingan anaklah yang paling diutamakan. Pada penelitian yang dilakukan, kondisi yang terjadi, baik di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang maupun di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo pelaksanaan dari pembinaan bagi perorangan tersebut dilakukan secara bersama-sama, sebagai contoh konseling yang seharusnya dilakukan hanya melibatkan satu anak, akan tetapi dalam pelaksanaannya, penulis menemukan bahwa kegiatan konseling dilakukan secara berkelompok. Hal tersebut apabila dilakukan secara bersama-sama kurang mendapat manfaat dari tujuan awal pembinaan secara perorangan tersebut. Jadi dapat dikatakan walaupun pembinaan anak demi kepentingan perorangan anak didik telah dikenal akan tetapi pelaksanaannya belum dapat diterapkan dengan baik.

Keadaan lain dijumpai oleh penulis, bahwa pembina masih sering menggunakan kekerasan dalam bentuk pengenaan sanksi yang berat. Kondisi tersebut terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang. Hal ini sangat mengganggu proses pembinaan anak secara perorangan, dalam arti bagaimana anak didik yang dibina itu dapat sejahtera apabila dalam pembinaan yang diterima masih menggunakan kekerasan dan bukan dilandasi

dengan kasih sayang. Jadi, dengan kata lain tujuan dari pembinaan secara perorangan yaitu untuk kesejahteraan anak didik tidak akan tercapai. Walaupun dalam wawancara penulis dengan pembina, baik di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang dan Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo mengatakan bahwa pelaksanaan pembinaan dengan model pembinaan secara perorangan ini dapat dikatakan berhasil. Namun penulis tetap beranggapan bahwa pelaksanaan pembinaan dilihat dari model pembinaan secara perorangan tidak diterapkan dengan baik atau belum ideal dari konsep pembinaan secara perorangan itu sendiri.

Berbicara mengenai bentuk ideal, seharusnya anak didik diberikan fasilitas dalam bentuk pembinaan yang memang benar-benar khusus diberikan kepada anak didik secara satu per satu. Bentuk ideal tersebut dapat berupa, seharusnya sel yang dihuni oleh anak didik tidak dihuni secara bersama-sama. Jadi satu sel hanya diisi oleh satu anak didik saja. Hal tersebut karena anak didik yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) dengan latar belakang yang berbeda-beda, misalnya jenis kejahatan yang dilakukannya, tingkat umur, pendidikan, dan sebagainya. Jadi, agar anak didik merasa nyaman dan tidak merasa takut terjadi perselisihan dengan anak didik yang lain sebaiknya memang harus ditempatkan dalam sel sendiri. Hal itu juga semata-mata demi kesejahteraan anak didik.

Bentuk ideal lain yang seharusnya diterapkan adalah program pembinaan yang ditujukan untuk perorangan anak didik benar-benar dilaksanakan untuk anak didik secara perorangan. Kondisi pembinaan, baik di

Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang maupun di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo secara umum dapat dikatakan sama. Penulis tidak menemukan anak didik yang benar-benar dibina secara individu atau perorangan, kondisi yang terjadi adalah anak didik dibina secara berkelompok untuk mendapat pembinaan yang seharusnya diberikan untuk anak didik secara perorangan. Kondisi yang demikian menuntut peran pembina agar lebih siap dan lebih peka dalam menangani dan memberikan pembinaan secara perorangan, misalnya jumlah pembina yang harus ditambah serta kualitas pembina juga harus ditingkatkan. Apabila hal tersebut dapat dilakukan dan dapat diterapkan dengan baik, maka pembinaan yang berorientasi pada perorangan anak didik akan terlaksana dan mencapai tujuan.

B. Kendala-Kendala yang Ditemui dalam Pelaksanaan *Individual Treatment Model* Terhadap Anak Nakal di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA)

1. Kendala dalam Pelaksanaan Pembinaan Anak Nakal Di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang

Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang merupakan Lembaga Pemasyarakatan Anak terbesar di Indonesia. Fasilitas dan kelengkapan yang ditujukan bagi anak didik di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang secara umum dapat dikatakan lengkap, khususnya untuk melakukan kegiatan pembinaan anak didik sehari-hari.

Sondang Pakpahan⁶¹ mengatakan bahwa dana yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan pembinaan terhadap anak didik di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang tidaklah murah. Akan tetapi, Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang banyak menerima sumbangan dana dari pihak-pihak lain sehingga kekurangan dana untuk mendukung jalannya pembinaan terhadap anak didik cukup teratasi.

2. Kendala dalam Pelaksanaan Pembinaan Anak Nakal Secara Individual Di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang

Pembinaan secara perorangan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang dapat penulis katakan masih jauh dari tujuan pembinaan secara perorangan itu sendiri, yaitu untuk kesejahteraan anak didik walaupun telah dikenal pembinaan yang ditujukan untuk perorangan anak didik. Penulis telah mencoba memaparkan bentuk ideal agar pembinaan secara perorangan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik akan tetapi masih terdapat kendala.

Berbicara mengenai kendala, dapat penulis kemukakan berdasarkan 3 (tiga) komponen, yaitu :

a. Struktur

Pembinaan anak secara perorangan atau individual memerlukan jumlah personil yang sangat banyak. Bahkan untuk mencapai hasil ideal, diperlukan 1 (satu) pembina untuk membina secara khusus 1 (satu) anak.

⁶¹ Sondang Pakpahan (Ka Sub Bimbingan dan Perawatan), *Wawancara*, (Tangerang :3 September 2008).

Kondisi inilah yang tidak mungkin untuk diterapkan karena jumlah pembina yang ada tidak mencukupi untuk membina masing-masing anak didik di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang yang jumlahnya ratusan anak. Selain jumlah pembina, pembinaan secara perorangan ini juga memerlukan banyak adanya peran serta dari psikolog, khususnya psikolog anak dan tokoh agama untuk memberikan bekal keagamaan pada anak didik. Aspek lain yang penting adalah kualitas dari pembina. Pembina yang dibutuhkan adalah pembina yang benar-benar berkualitas dan sangat memahami masalah mengenai anak. Jadi, menurut penulis disamping kuantitas juga perlu, akan tetapi juga harus diperhatikan kualitas dari pembina juga.

Pembina yang berkualitas berarti harus sering mengikuti pendidikan khususnya untuk menangani masalah seputar anak nakal, oleh karena itu harus mempunyai dana yang lebih agar pembina dapat mendalami pendidikan yang mendaalm seputar masalah anak. Jadi kendala lainnya adalah dana. Penggunaan model pembinaan anak secara perorangan jelas membutuhkan dana yang tidak sedikit. Pembinaan secara individual membutuhkan banyak fasilitas berupa sarana dan prasarana yang memang secara khusus disediakan untuk anak didik. Fasilitas tersebut misalnya sel yang dihuni secara individual, dalam arti terpisah satu anak didik dengan anak didik yang lain, ruangan yang secara khusus benar-benar untuk mendukung jalannya pembinaan secara perorangan.

b. Substansi

Substansi lebih mengarah kepada peraturan yang telah ada khususnya mengenai anak itu telah dijalankan dengan baik atau tidak. Selain itu, apakah peraturan perundang-undangan tersebut telah memenuhi hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan anak, khususnya perlindungan anak nakal. Berdasarkan pengamatan penulis, anak didik di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang banyak yang dijatuhi pidana penjara. Kondisi inilah yang akan membuat jiwa dan beban anak didik tersebut semakin berat. Oleh karena itu, seharusnya peraturan perundang-undangan yang ada dapat digunakan bagi kepentingan anak saja karena peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang ini cenderung mengakibatkan stigma pada diri anak pelaku.

c. Kultur

Peran serta pihak lain sangat dibutuhkan dalam upaya rehabilitasi dan resosialisasi anak didik. Pihak pertama yang harus memberi dukungan adalah keluarga. Anak didik yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang ini kebanyakan jauh dari keluarga. Walaupun banyak diantara mereka yang sering dikunjungi oleh keluarga, akan tetapi tidak sedikit pula yang jarang dikunjungi oleh keluarga. Selain keluarga, pihak lain yang penting adalah masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang sering menerima adanya kunjungan sosial. Kunjungan sosial ini biasanya melibatkan lembaga masyarakat.

Menurut **Sondang Pakpahan**⁶² kunjungan sosial adalah waktu yang sangat tepat untuk mensosialisasikan anak didik terutama yang akan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) agar anak didik itu dapat diterima kembali ke dalam masyarakat. Pembina Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) memberikan penjelasan bahwa anak tersebut sudah mendapatkan pembinaan dengan baik dan sudah mengikuti kegiatan lain sebagai bekal hidup sehingga kepada anak didik tersebut hanya diperlukan untuk menghilangkan stigma buruk terhadap anak tersebut. Hal tersebut sangat penting karena apabila anak masih mempunyai stigma buruk dari masyarakat maka anak akan cenderung melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi. Jadi, menurut penulis, kegiatan pembinaan yang dijalankan sewaktu di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) menjadi sia-sia. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan adanya partisipasi dari masyarakat, khususnya ketika anak didik telah selesai menjalani hukuman dan bersiap kembali ke dalam lingkungan masyarakat.

3. Kendala dalam Pelaksanaan Pembinaan Anak Nakal Di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo

Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan terhadap anak nakal yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan, dalam hal ini disebut sebagai anak didik pemasyarakatan tidak selamanya berjalan dengan baik. Lembaga Pemasyarakatan

⁶² Sondang Pakpahan (Ka Sub Bimbingan dan Perawatan), *Wawancara*, (Tangerang : 3 September 2008).

Anak (LPA) Kutoarjo juga mengalami kendala pada saat melaksanakan pembinaan.

Menurut **Paiman Saptohudoyo** dikatakan bahwa kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut :⁶³

- a. Hambatan yang bersifat personal, yaitu :
 1. kurangnya kemauan atau niat dan kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh anak didik masyarakat;
 2. tenaga pengajar atau pendidikan yang kurang berkualitas;
- b. Hambatan yang bersifat fasilitatif, yaitu :
 1. peralatan yang digunakan untuk makan, minum dan memasak sudah tidak layak untuk dipakai;
 2. buku-buku perpustakaan yang jumlahnya masih terbatas;
 3. fasilitas untuk kegiatan yang jumlahnya terbatas;
 4. fasilitas kesehatan yang masih sangat terbatas.

Adanya kendala-kendala yang dialami selama melaksanakan pembinaan mendorong Lembaga Masyarakat Anak (LPA) Kutoarjo untuk melakukan pemecahan terhadap kendala-kendala tersebut.

Menurut **Paiman Saptohudoyo**⁶⁴ akan dicari pemecahannya, yaitu dalam hal terdapat kurangnya kemauan dan kemampuan yang dimiliki oleh anak didik masyarakat, maka Lembaga Masyarakat Anak (LPA) Kutoarjo akan berusaha untuk menyalurkan anak tersebut ke dalam program pembinaan melalui kegiatan yang disesuaikan dengan niat maupun bakatnya.

⁶³ Paiman Saptohudoyo (Ka Sub Sie Bimkeswat), *Wawancara*, (Kutoarjo : 14 Agustus 2008).

⁶⁴ Paiman Saptohudoyo (Ka Sub Sie Bimkeswat), *Wawancara*, (Kutoarjo: 14 Agustus 2008).

Bagi tenaga pengajar yang membimbing anak didik pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo membekalinya dengan pelatihan, penataran, kursus sehingga akan mendapatkan tenaga pengajar yang berkualitas.

Apabila dilihat dari kendala-kendala yang bersifat fasilitatif, maka Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo juga berusaha untuk melakukan suatu usaha, misalnya dengan mengadakan peralatan baru yang memadai. Khusus untuk buku, biasanya Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo meminta bantuan dari mahasiswa yang melaksanakan penelitian.

4. Kendala dalam Pelaksanaan Pembinaan Anak Nakal Secara Individual Di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo

Pembinaan secara individual yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo juga tidak lepas dari kendala-kendala yang ada. Kendala yang ada hampir sama dengan kendala yang dijumpai di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang, yaitu jumlah pembina, baik pembina Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo maupun pembina khusus, yaitu psikolog maupun tokoh agama tidak mencukupi untuk membina anak didik di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo, selain itu pembina yang dapat dikatakan merupakan tenaga ahli dibidang anak juga sangat sedikit. Jadi disamping kuantitas juga kualitas dari pembina sangat diperlukan. Kendala lain, yaitu dana. Pembinaan anak secara

individual baru benar-benar dapat dilaksanakan dengan benar apabila terdapat fasilitas berupa sarana dan prasarana yang mendukung. Dengan kata lain, model pembinaan secara perorangan ini memang membutuhkan biaya yang sangat mahal, karena segala hal yang dibuat dan diberikan adalah semata-mata demi kepentingan terbaik anak; kurangnya kemauan dan minat dari si anak untuk dibina secara individual. Hal tersebut dikarenakan banyak anak didik yang masih ingin bermain dan bersama-sama dengan anak didik lain dalam menjalankan program pembinaan.

Kendala lain khususnya yang banyak dialami oleh anak didik ketika selesai menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA), yaitu banyak masyarakat khususnya yang bertempat tinggal di sekitar lokasi tempat tinggal anak didik belum sepenuhnya bisa menerima keadaan mereka. Jika anak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, maka masyarakat mendorong untuk dihukum saja, dan apabila anak telah selesai menjalankan hukumannya, maka masyarakat belum tentu mau menerima anak tersebut kembali ke dalam lingkungannya.

Program pembinaan yang ditetapkan baik secara umum maupun dengan menggunakan metode pembinaan secara perorangan ternyata tidak hanya ditentukan oleh besar kecilnya anggaran atau dana yang dimiliki, tetapi juga bergantung pada Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo dalam memaksimalkan sesuatu yang ada sehingga dapat membuahkan hasil dan dapat berguna untuk mendukung program pembinaan ini.

Hal lain yang mendukung keberhasilan pembinaan anak didik masyarakat adalah adanya partisipasi dari orang tua, keluarga, dan masyarakat. Dengan memperhatikan dan bersikap mau menerima anak tersebut, maka program pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) akan berjalan dengan baik dan berhasil.

C. Bentuk Model Alternatif Lain dalam Pembinaan Anak Nakal di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA)

Pembicaraan mengenai hukum pidana, khususnya hukum pidana anak saat ini (*ius constitutum*) dan mengenai pelaksanaan pembinaan anak berdasarkan model pembinaan anak perorangan (*individual treatment model*) yang merupakan praktek penerapan pembinaan anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) yang berlaku saat ini (*ius operatum*) telah penulis uraikan dalam sub bab sebelumnya. Segala kekurangan yang ada pada pelaksanaan pembinaan anak berdasarkan model pembinaan anak perorangan menuntut untuk dicari model pembinaan lain yang seharusnya dengan segala pertimbangan bagi kepentingan anak di masa datang (*ius constituendum*).

Sebagaimana penulis telah sebutkan diatas, model pembinaan anak perorangan atau *individual treatment model* merupakan suatu model pembinaan anak yang telah dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Anak, baik di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo maupun di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang. Pelaksanaan pembinaan secara

individual ini telah dikenal tetapi dalam pelaksanaannya belum dapat diterapkan dengan baik.

Model pembinaan anak perorangan atau *individual treatment model* berguna untuk mengobati anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Anak akan mendapatkan pelayanan terapi khususnya untuk mengobati sakitnya melalui suatu pembinaan dengan tujuan agar setelah selesai menjalani pembinaan, ia dapat kembali ke lingkungannya semula.

Pembinaan berdasarkan model ini merupakan suatu model yang sangat berorientasi pada kesejahteraan anak. Jadi hanya berkonsentrasi pada kepentingan anak, tanpa melihat dan melibatkan pihak lain. Model ini juga memakan biaya yang mahal. Model pembinaan perorangan juga memberikan jaminan hukum yang lemah karena masih belum dapat memberikan sanksi yang efektif. Oleh karena itu, pada pembinaan yang berdasarkan model ini, pengadilan disebut pula sebagai agen sosial dan bukan merupakan agen hukum.⁶⁵

Segala kekurangan dalam pelaksanaan pembinaan anak berdasarkan model pembinaan perorangan memunculkan model pembinaan lain yang dapat merupakan model alternatif yang seharusnya dapat diterapkan untuk membina anak didik masyarakat. Kondisi yang sebenarnya perlu diterapkan adalah pembinaan terhadap anak harus dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak yang ada sekitarnya, apakah itu anak sebagai pelaku, dan masyarakat serta tidak tertutup kemungkinan dilibatkannya korban. Hal

⁶⁵ Paulus Hadisuprpto, *Bahan Kuliah Hukum Pidana Anak*, (Semarang : Program MIH UNDIP, 2007)

tersebut yang memunculkan suatu bentuk model yang berbeda dari model pembinaan anak perorangan. Model tersebut adalah model pembinaan berdasarkan peradilan restoratif. Model pembinaan ini dapat dijadikan alternatif dari pembinaan anak di masa datang.

Konsep pembinaan berdasarkan peradilan anak restoratif telah muncul dari dua puluh tahun yang lalu sebagai suatu proses dimana semua pihak yang saling berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat dimasa yang akan datang.⁶⁶ Pembinaan secara restoratif ini merupakan upaya yang dapat diselesaikan diluar proses formal, yaitu dengan melibatkan masyarakat. Hal itu dilakukan dengan alasan untuk mengurangi jumlah anak nakal yang ditangkap, ditahan, bahkan harus dibina di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Adanya pembinaan secara restoratif juga dapat mengembalikan anak dalam situasi kehidupan normal karena tidak ada dendam sebab pelaku telah dimaafkan oleh korban. Peran keluarga disini juga sangat dituntut dalam mengatasi kenakalan anak.

Model pembinaan restoratif merupakan suatu wujud model yang melibatkan peran serta dari masyarakat dan pihak lain dalam mengadakan proses peradilan dan pembinaan terhadap anak pelaku kejahatan. Penanganan terhadap anak dilakukan secara lebih manusiawi. Kondisi ini sangat berbeda dengan model pembinaan anak secara perorangan karena pada model ini

⁶⁶ Melani, *Raju Potret Buram Peradilan Anak Indonesia*, www.pikiranrakyat.com

disamping memperhatikan kebutuhan anak, juga harus memperhatikan kebutuhan pihak lainnya, yaitu masyarakat dan korban.

Pembinaan berdasarkan model restoratif ini berangkat dari asumsi bahwa tanggapan atau reaksi atas delinkuensi anak tidak akan efektif tanpa adanya kerjasama dan keterlibatan dari korban, pelaku, dan masyarakat. prinsip yang mendasari adalah bahwa keadilan paling baik terlayani apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang.⁶⁷ Model pembinaan ini juga berusaha untuk memperbaiki insan manusia anggota masyarakat dengan cara menghadapkan pelaku delinkuen pada tanggung jawabnya terhadap korban. Korban yang biasanya terabaikan dalam proses peradilan diberikan kesempatan untuk ikut berperan serta dalam proses peradilan.⁶⁸ Keterlibatan para pihak berwujud dengan adanya pemberian maaf maupun pemberian kasih sayang sehingga kemungkinan korban dapat sembuh dari sakitnya sangat terbuka, korban dapat aktif terlibat dalam penyelenggaraan mediasi, selain itu korban dapat menyarankan kepada masyarakat mengenai proses untuk rehabilitasi bagi anak dan disamping itu hukuman yang dijalani oleh anak bertujuan untuk lebih merekonsiliasi anak.

Muladi mengemukakan secara rinci ciri-ciri peradilan restoratif, berikut ini :⁶⁹

1. kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain dan dipandang sebagai konflik.
2. fokus perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban untuk masa datang.
3. sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi.

⁶⁷ *Ibid*, hal 319.

⁶⁸ Paulus Hadisuprpto, *op.cit*, hal 36.

⁶⁹ Muladi, *Op.cit*, (Semarang : BP Universitas Diponegoro, 1995), hal 127-129.

4. restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi merupakan tujuan utama.
5. keadilan dirumuskan sebagai hubungan antar hak, dinilai atas dasar hasil.
6. fokus perhatian terarah pada perbaikan luka sosial akibat kejahatan.
7. masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif.
8. peran korban dan pelaku diakui, baik dalam penentuan masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku didorong untuk bertanggung jawab.
9. pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman atas perbuatannya dan diarahkan untuk ikut memutuskan yang terbaik.
10. tindak pidana difahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis.
11. stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.

Pembinaan anak yang seharusnya harus menekankan bahwa anak dan keluarga adalah hal yang utama sehingga diupayakan pada diri anak dapat dianggap mampu untuk belajar dari akibat perbuatan serta belajar dari pengalamannya. Jadi keluarga harus berperan lebih aktif dalam mendidik anak, khususnya memberikan nasihat bahkan teguran kepada anak jika anak melakukan perbuatan yang tidak baik. Pembinaan ini juga memerlukan adanya perubahan sikap dari Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) sebagai tempat pembinaan karena pada program pembinaan yang menekankan pada individu anak, seperti konseling, keagamaan tetap diperlukan sebatas agar anak dapat aktif mengikuti program tersebut.

Peran masyarakat juga sangat besar dalam pembinaan secara restoratif. Hal tersebut dapat dimulai dengan perubahan perilaku anak menjadi baik dan positif kemudian pada anak diharapkan menjadi anak yang patuh sehingga pada akhirnya anak dapat berkembang dan menjadi bagian seutuhnya dari masyarakat. Wujud dari peran masyarakat, misalnya masyarakat dapat menjadi mediator yang dapat membantu korban agar pelaku dapat memenuhi kewajiban ganti rugi atas perbuatannya sedangkan peran

masyarakat bagi pelaku adalah memberikan bimbingan kepada pelaku agar berubah menjadi orang yang lebih baik. Kepada anak juga harus diberikan ruang untuk menunjukkan kompetensinya sehingga pada diri anak akan menjalin keterikatan dengan masyarakat.

Pada tahun 1990, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan Standar Minimum Aturan atau *United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures (The Tokyo Rules)* adopted by General Assembly Resolution 45/110 of 14 December 1990. *The Tokyo Rules* lebih mengedepankan alternatif pembinaan di luar lembaga. Jadi, anak nakal tidak hanya dapat dibina di dalam Lembaga Pemasyarakatan saja tetapi dapat dimungkinkan untuk menjalani pembinaan yang dilaksanakan di luar lembaga, dalam hal ini diluar Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA).

Aturan yang terdapat dalam *Rule 1.2 The Tokyo Rules*⁷⁰ mengharuskan masyarakat untuk terlibat khususnya terhadap pelaku sehingga pada pelaku timbul rasa tanggung jawab terhadap masyarakat. Dengan demikian kegunaan Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat untuk melakukan pembinaan dapat dialihkan dengan alternatif pembinaan yang dilakukan diluar lembaga.

Anak sebagai pelaku biasanya menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA). Tetapi dengan adanya alternatif pembinaan di luar lembaga, anak dapat menjalaninya tanpa harus berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak. Hal ini merupakan hal yang baru dalam pembinaan khususnya terhadap anak didik.

⁷⁰ Lihat Lampiran *United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures (The Tokyo Rules)* adopted by General Assembly Resolution 45/110 of 14 December 1990.

Konsep KUHP tahun 2006 dalam Pasal 116 mengatur mengenai jenis pidana yang dapat dijatuhkan bagi anak, yaitu :⁷¹

- (1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas :
 - a. Pidana verbal :⁷²
 1. pidana peringatan; atau
 2. pidana teguran keras;
 - b. Pidana dengan syarat :
 1. pidana pembinaan diluar lembaga;
 2. pidana kerja sosial; atau
 3. pidana pengawasan;
 - c. Pidana denda; atau
 - d. Pidana pembatasan kebebasan :
 1. pidana pembinaan di dalam lembaga;
 2. pidana penjara; atau
 3. pidana tutupan.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas :
 - a. perampasan barang-barang tertentu dan/atau tagihan;
 - b. pembayaran ganti kerugian; atau
 - c. pemenuhan kewajiban adat.

Pembinaan bagi anak dapat dijalani tidak di dalam tembok Lembaga Pemasyarakatan Anak. Pengaturan jenis pidana pokok dalam Konsep KUHP Tahun 2006 disusun mulai dari pidana yang ringan dan secara bertahap ke pidana yang lebih berat (penjelasan Pasal 116 Konsep KUHP Tahun 2006). Pidana *non-custodial* yang ada dalam Konsep KUHP Tahun 2006 tidak hanya pidana pembinaan diluar lembaga saja akan tetapi juga dimungkinkan terhadap anak dijatuhkan pidana lainnya yang tidak perlu dijalankan di dalam

⁷¹ Konsep KUHP Tahun 2006, ELSAM.

⁷² - Pidana verbal adalah jenis pidana yang paling ringan dan tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan bagi anak.
- Pidana peringatan adalah pemberian nasihat kepada anak agar menjauhi perbuatan yang negatif.
- Pidana teguran keras adalah tidak hanya sekedar memberi nasihat melainkan anak diberi peringatan keras.

Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA), seperti pidana kerja sosial dan pidana pengawasan.⁷³

Pasal 119 ayat (1) Konsep KUHP Tahun 2006, menyebutkan bahwa pidana pembinaan diluar lembaga dapat berupa keharusan :

- a. mengikuti program bimbingan dan penyuluhan yang dilakuakn oleh pejabat pembina;
- b. mengikuti terapi di Rumah Sakit Jiwa; atau
- c. mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pembinaan yang dilakukan diluar lembaga merupakan cara yang lebih efektif digunakan dalam menangani masalah kelakuan, misalnya anak yang mempunyai ketergantungan terhadap obat-obatan terlarang dapat mengikuti penyuluhan kegiatan tentang obat-obatan terlarang. Kondisi yang seperti inilah yang belum diterapkan karena pembinaan yang ada masih cenderung dilakukan di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA).

Proses pembinaan yang dilakukan terhadap anak dengan melibatkan pihak-pihak diluar Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) telah diatur dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yaitu dengan dapat dijatuhkannya wajib latihan kerja dan pidana pengawasan.⁷⁴ Pidana

⁷³ Pidana pembinaan di luar lembaga dimaksudkan untuk memberikan pembinaan kepada anak, baik dalam rangka penyembuhan karena tidak atau kurang mampu bertanggung jawab pidana disebabkan sakit jiwa atau retardasi mental ataupun berupa pembinaan lainnya bagi anak yang sehat jiwanya untuk memperoleh keterampilan yang berguna bagi kehidupannya. (Penjelasan Pasal 119 Konsep KUHP Tahun 2006).

⁷⁴ Wajib Latihan Kerja dimaksudkan sebagai pengganti pidana denda yang sekaligus untuk mendidik anak yang bersangkutan agar memiliki keterampilan yang bermanfaat bagi dirinya. Wajib latihan kerja dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan di malam hari. Sedangkan yang dimaksud dengan pidana pengawasan adalah pidana yang khusus dikenakan untuk, yakni pengawasan yang dilakukan oleh jaksa terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari

pengawasan diatur dalam Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun. Sedangkan pengawasan diberikan kepada Jaksa dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan (Pasal 30 ayat 2).

Konsep KUHP Tahun 2006 menggunakan istilah yang berbeda untuk wajib latihan kerja. Istilah yang digunakan pada Konsep KUHP Tahun 2006 adalah pidana kerja sosial. Pelaksanaan pidana kerja sosial untuk anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam. Sedangkan pidana pengawasan yang dikenakan bagi anak, dapat dijatuhkan dengan syarat anak tidak akan melakukan tindak pidana, anak dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan, harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul oleh tindak pidana yang dilakukan dan anak harus melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik. (Pasal 78 ayat (3) butir c Konsep KUHP Tahun 2006. Syarat mengenai penjatuhan pidana pengawasan ini tidak ada dalam undang-undang yang berlaku saat ini, yaitu Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Penjelasan uraian diatas memberikan perlakuan khususnya bagi anak untuk diberikan keringanan agar tidak menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA), sehingga sedapat mungkin stigma terhadap anak tersebut dapat dicegah. Oleh karena itu, ketentuan yang berlaku saat ini

dirumah anak tersebut, dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. (Penjelasan Pasal 30 UU No.3 Tahun 1997).

perlu dilakukan perubahan atau dilakukan harmonisasi antara hukum pidana nasional dengan ketentuan internasional, sehingga penerapan pembinaan secara restiratif dapat terwujud. Pembinaan restoratif diharapkan dapat berguna bagi pembinaan khususnya bagi anak di masa datang karena dengan keterlibatan antara anak dengan masyarakat, yaitu adanya partisipasi yang tinggi dari keterlibatan pihak-pihak lain dan adanya rasa aman bagi masyarakat berada di tengah-tengah upaya pembinaan terhadap anak nakal maka akan tercipta kondisi yang baik, yaitu menurunnya tingkat penghuni anak didik dan residivis pelaku anak di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA).

BAB IV

PENUTUP

Sebagai penutup dari penulisan tesis ini, penulis akan menarik kesimpulan dari uraian-uraian serta pembahasan-pembahasan dalam bab-bab sebelumnya. Selain itu, penulis akan memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak.

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan *individual treatment model* atau model pembinaan anak individual atau perorangan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Anak, baik di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo dan Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang telah dikenal. Bentuk dari pembinaan anak secara individual adalah pembinaan secara keagamaan dan konseling. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, pembinaan anak yang dilakukan dengan model pembinaan anak perorangan di kedua Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) tidak dapat diterapkan dengan baik. Pembinaan yang seharusnya ditujukan untuk anak didik secara perorangan dalam prakteknya dilakukan oleh anak didik secara berkelompok. Hal inilah yang mengindikasikan pembinaan anak secara perorangan tidak berjalan dengan baik di

Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang dan Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kotuarjo.

2. Pelaksanaan *individual treatment model* atau pembinaan anak secara perorangan juga tidak lepas dari kendala-kendala yang ada. Kendala dapat dilihat dari struktur, substansi, dan kultur. Pada struktur, pembinaan anak perorangan memerlukan kuantitas dan kualitas dari tenaga pembina yang berhadapan langsung dengan anak didik. Pada substansi, peraturan perundang-undangan mengenai anak mengakibatkan timbulnya stigma yang membekas pada diri anak. Pada kultur, sangat dibuthkan peran pihak di luar Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA), yaitu keluarga dan masyarakat. Pembinaan yang benar-benar ditujukan untuk anak secara perorangan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut diperlukan untuk menyediakan fasilitas berupa sarana dan prasarana, seperti ruangan khusus untuk pendukung pelaksanaan pembinaan secara perorangan, sel tempat tinggal yang dihuni oleh anak didik satu per satu, dan sebagainya.
3. *Individual treatment model* atau pembinaan anak secara individual merupakan suatu bentuk pembinaan yang hanya berorientasi kepada anak. Pembinaan ini adalah untuk mengobati anak yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum oleh karenanya anak tersebut membutuhkan suatu terapi untuk mengobati rasa sakitnya melalui suatu pembinaan dengan tujuan agar setelah selesai menjalani

pembinaan, ia dapat kembali ke lingkungannya semula. Dengan kata lain, kepentingan dan kesejahteraan anak adalah hal yang penting.

Adanya kelemahan dalam pembinaan secara individual memunculkan suatu bentuk pembinaan lainnya, yaitu model pembinaan restoratif. Dalam pembinaan secara restoratif, sebaiknya dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak yang ada disekitarnya, yaitu pelaku, keluarga, masyarakat, dan tidak tertutup kemungkinan korban. Jadi pembinaan anak secara restoratif ini membina anak secara lebih manusiawi, karena tidak hanya kebutuhan anak saja yang diperhatikan tetapi juga kebutuhan lainnya, yaitu kebutuhan masyarakat dan korban. Jadi, masyarakat berperan menjadi mediator yang dapat membantu korban agar pelaku memenuhi kewajiban untuk ganti kerugian. Perbuatan yang dilakukan oleh anak hanya dipandang sebagai konflik dan pelanggaran oleh karena itu pembinaan tidak hanya dapat dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) saja tetapi juga dimungkinkan adanya pembinaan yang dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA), seperti yang telah diatur dalam *The Tokyo Rules* dan dalam ketentuan hukum pidana di masa datang, yaitu dimungkinkan pada anak untuk diberikan pidana pembinaan diluar lembaga, disamping telah ada pidana kerja sosial, dan pidana pengawasan.

B. Saran

1. Pelaksanaan pembinaan anak secara individual yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) sudah tidak efektif dan ideal lagi dalam pelaksanaan pembinaan anak didik. Untuk itu, perlu dipikirkan model pembinaan lainnya yang lebih efektif dalam membina anak didik di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA).
2. Pengenaan sanksi juga perlu dikurangi terutama sanksi yang berat, karena hal tersebut sangat menyiksa diri anak. Rasa patuh anak terhadap pembinanya akan tumbuh dengan sendirinya apabila anak didik juga diberikan perhatian dan kasih sayang.
3. Pembinaan bagi anak didik di luar lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) sangat perlu untuk dilakukan. Hal tersebut bertujuan agar lebih mendekatkan diri pada lingkungan masyarakat. Pada anak juga harus diberikan pengembangan sikap dan keahlian agar dapat terikat pada masyarakat.
4. Penyuluhan harus diberikan kepada masyarakat agar dapat menerima kembali anak-anak yang telah selesai menjalani hukumannya sehingga anak-anak tersebut dapat menjalankan kegiatannya sebagai anak seusianya.
5. Perlu segera diterapkan model pembinaan restoratif sebagai model alternatif dalam pembinaan anak nakal sehingga diharapkan dapat mengatasi masalah atau kasus mengenai delinkuensi anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 2004.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT.Rineka Cipta, 2004.
- Atmasasmita, Romli, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Bandung : Armico, 1983.
- Atmowiloto, Arswendo, *Hak-Hak Narapidana*, Jakarta : ELSAM, 1996.
- Diktat Akpol, *Sisdil di Indonesia*, Semarang : Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, 2005.
- Gerungan, W.A, *Psikologi Sosial Suatu Ringkasan*, Bandung : Eresco, 1996.
- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta : Akademika Presindo, 1993
- _____, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta : PT. Bhuana Ilmu Populer, 2004.
- Gunakarya, A.Widiada, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Bandung : Amrico, 1988.
- Hadikusuma, Hilman, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 1995.
- Hadisuprpto, Paulus, *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 1997.
- _____, Ilmu Hukum dan Pendekatannya, Makalah dalam rangka Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang : UNDIP, 2006.
- _____, *Pemberian Malu Reintegratif sebagai Sarana Nonpenal Penanggulangan Perilaku Delinkuensi Anak*, disertasi doktor, Semarang : Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2002.
- _____, *Bahan Kuliah Hukum Pidana Anak*, Semarang : Program MIH UNDIP, 2007

- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 1994.
- Harsono, H.S, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana* , Jakarta : Djambatan, 1995.
- Ibrahim, Jhony, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayu Media, 2005.
- Irwan, Petrus. P dan Pandapotan S., *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Sinar Harapan, 1996.
- Kartono, Kartini, *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*, Bandung : Mandar Maju, 1995.
- _____, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2008.
- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), *Konsep KUHP Baru 2006*.
- Loqman, Loebby, *Makalah Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi*, Semarang : Universitas Diponegoro, 1995.
- _____, *HAM Hak Asasi Manusia dalam HAP Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Datacom, 2002.
- _____, (Makalah Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi), Semarang : Universitas Diponegoro, 1995.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- _____, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997.
- _____, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung : Alumni, 1984.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1992.
- Mulyana, Dedy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Rosdakarya, 2003.
- Nawawi Arief, Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- _____, *Bahan Kuliah Politik Hukum Pidana*, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

- _____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Kencana, 2008.
- P.A.F, Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung : Armico, 1984.
- Panggabean, Mompang, L, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier di Indonesia*, Jakarta : UKI Press, 2005.
- Poernomo, Bambang, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta : Liberty, 1986.
- Prinst, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Putra Jaya, Nyoman Serikat, *Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Semarang : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2006.
- Reksodiputro, Mardjono, *Masa Depan Lembaga Pemasyarakatan Anak dan Lembaga Pemasyarakatan Wanita*, (Makalah pada Seminar Terpidana III, UI-Masumoto Foundation Japan), Jakarta, 1995.
- Salam, Moch.Faisal, *Hukum Acara Peradilan Anak*, Bandung : Mandar Maju, 2005.
- Sarwono, Sarlito Wirawan, *Psikologi Remaja (Edisi Revisi)*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2003.
- Simandjuntak, B, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung : Tarsito, 1981.
- Soedarsono, *Kenakalan Remaja*, Jakarta : Rineka Cipta, 1990.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1984.
- Soemadi Praja, R.Achmad S dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung : Percetakan Ekonomi, 1992.
- Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982.
- _____, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri Cetakan V*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1995.
- Soetodjo, Wagiaty, *Hukum Pidana Anak*, Bandung : Refika Aditama, 2006.

- Sudikno.M, *Penemuan Hukum – Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 1996.
- Sumiarni, Endang.M.G, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta : Universitas Atmajaya, 2003.
- Supramono, Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta : Djambatan, 2007.
- Susanto, I.S, *Kriminologi*, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1995.
- Wiratmo Loekita, Sri Widoyati, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Jakarta : LP3ES, 1989.

Peraturan Perundang-undangan :

- United Nations Standards Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules). Adopted by General Assembly Resolution 40/33 of 29 November 1985
- United Nations Standards Minimum Rules for Non-Custodial Measures (The Tokyo Rules). Adopted by General Assembly Resolution 45/110 of 14 December 1990
- Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Website :

- Astuti, Mulia, *Pola Pembinaan Kesejahteraan Anak dan Keluarga*, www.worldcat.org
- Hukum dan HAM, Pembebasan Bersyarat, www.hukumdanham.info
- Melani, *Raju Potret Buram Peradilan Anak Indonesia*, www.pikiranrakyat.com
- M.Musa, *Peradilan Restoratif Suatu Pemikiran Alternatif System Peradilan Pidana Anak Indonesia*, www.legalitas.org

Pratama, Rommy, *Sistem Pembinaan Para Narapidana Untuk Pencegahan Residivisme*, www.blogspot.com

Purniati, Mamik Sri Supatmi, Ni Made Mantini Tinduk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, www.openlibrary.org

Wicaksono, Bagus, *Negara Perlu Memperhatikan Lagi Lapas Anak*, www.kabarindonesia.com